

**PERANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM PEMBINAAN ATLET SEJAK USIA DINI**

**Oleh:
REZATUL HELMI
NPM : 177322068**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga Tesis saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, Istri dan Anak saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki mereka yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi pendamping yang sempurna.

Kepada dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di Kampus. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen, Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. Seluruh teman di kampus tercinta Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : REZATUL HELMI, SSTP
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Oktober 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Nama Orang Tua :
 Ayah : M. Yunus
 Ibu : Hj. Rosmawati, M.si
6. Pendidikan : SDN 024 PKL Kerinci Lulus Tahun 2002
 SMPN 1 PKL Kerinci Lulus Tahun 2005
 SMAN 1 PKL Kerinci Lulus Tahun 2008
 S-1 IPDN Jatinangor Lulus Tahun 2012
7. Alamat : Jalan Kasah No 2 Tangkerang Tengah
8. Email : Rezayahru@gmail.com
9. Riwayat Pekerjaan

No	Jabatan/Pekerjaan	Mulai dan Sampai
1.	Staff Protokol SETDA Pekanbaru	2012 S/D 2013
2.	Sekretaris Lurah Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya	2013 S/D 2014
3.	Kasubbag Jasmani dan Rohani	2014
4.	Kasubbag Protokol	2014 S/D 2019
5.	Kasubbag Humas	2019 S/D 2020
6.	Kepala Operasional SATPOL PP Pekanbaru	2020 S/D Sekarang

Pekanbaru , Juli 2021


REZATUL HELMI, SSTP

LEMBARAN TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan kemuliaan bagi orang yang berilmu, yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah.

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S Al-Mujadilah: 11).

Rasulullah dalam sabdanya mengatakan bahwa perjalanan mencari ilmu merupakan salah satu jalan yang memudahkan kita menuju surga.

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Ibnu Majah & Abu Dawud).

**PERANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN
ATLET SEJAK USIA DINI**

Oleh : Rezatul Helmi

ABSTRAK

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru sebagai pencari bakat ataupun bibit atlet harus maksimal, saat ini masih banyak sebenarnya bibit-bibit usia dini/ pelajar yang ada di sekolah-sekolah belum terpantau. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peranan dan faktor penghambat Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini. Metode penelitian ini bersifat *kualitatif deskriptif*, dengan menggunakan teknik analisis data secara *induktif*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pembinaan Atlet sejak usia dini, dilihat dari indikator peranan organisasi yang meliputi: Rencana Strategis, Kebijakan, Pembinaan SDM dan Komunikasi cukup efektif, hal tersebut terlihat dari perencanaan yang telah disusun yakni adanya Latihan rutin pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di tiap Cabang Olahraga, Namun, peran Dispora dalam mengkoordinasikan keseluruhan sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru, guna mengidentifikasi atlet untuk menemukan bibit baru dari bakat yang telah dimiliki masih sangat minim, Faktor kendala antara lain, terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah terhadap pendanaan olahraga dan sistem pembinaan belum terarah, minimnya Sarana dan Prasarana dan rendahnya peran pengurus terkait.

Kata kunci : *Peran, Pembinaan, Atlet Usia Dini.*

**THE ROLE OF YOUTH AND SPORTS OFFICES
PEKANBARU CITY REGIONAL GOVERNMENT
IN THE DEVELOPMENT OF ATHLETES SINCE EARLY AGE**

By Rezatul Helmi

ABSTRACT

The role of the Pekanbaru City Youth and Sports Office as talent scouts or athlete seeds must be maximized, currently there are actually many early age seeds/students in schools that have not been monitored. This study aims to explain the role and inhibiting factors of the Pekanbaru City Government Youth and Sports Office in Coaching Athletes from an Early Age. This research method is descriptive qualitative, using inductive data analysis techniques. The results of the study explain that the role of the Pekanbaru City Government Youth and Sports Office in coaching athletes from an early age, seen from the indicators of the organization's role which includes: Strategic Plans, Policies, Human Resources Development and Communication is quite effective, it can be seen from the planning that has been prepared, namely the existence of Routine training at the Student Sports Education and Training Center (PPLP) in each Sport Branch, however, the role of Dispora in coordinating all schools in Pekanbaru City, in order to identify athletes to find new seeds of talent that they already have is still very minimal. other, the limited capacity of the Regional Government to fund sports and the coaching system has not been directed, the lack of facilities and infrastructure and the low role of the relevant management.

Keywords: Roles, Coaching, Early Athletes.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“PERANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN ATLET SEJAK USIA DINI “** dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah proposal tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian proposal tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP.,MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum dan Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi kesempurnaan proposal tesis saya ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas motivasi dan kasih sayang, doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak, adik dan seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
6. Istri tersayang dan anakku atas kasih sayang memberikan semangat, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga yang selalu menemani dalam setiap detik dan menit dalam menjalankan hidup ini;
7. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
9. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pekanbaru, Kepala Bidang dan seluruh Staf terkait serta adik-adik atlet Usia Dini yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun ilmu pengetahuan, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Agustus 2021

Rezatul Helmi

DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Persetujuan Penguji	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
SK Bimbingan Asli	iii
Surat Pernyataan	iv
Turnitin	v
Lembar Persembahan	vi
Lembar Tunjuk Ajar	vii
Daftar Riwayat Hidup	viii
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Pustaka	18
2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	18
2.1.2 Kewenangan Pemerintah.....	22
2.1.3 Kebijakan	28
2.1.4 Konsep Organisasi	34
2.1.5 Konsep Peranan Organisasi.....	37
2.1.6 Konsep Sumber Daya Manusia	44
2.1.7 Konsep Pembinaan	48
2.1.8 Konsep dan Teori Pemuda dan Usia Dini	56
2.2 Kerangka Pemikiran	61
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	63
2.4 Konsep Operasional	66
2.4 Operasional Variabel	67
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tipe/Jenis Penelitian	69
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian	70
3.3 Informan Penelitian	70
3.4 Jenis Dan Sumber Data	71
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.6 Teknik Analisis Data	73
3.7 Jadwal Penelitian	75

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.....	76
4.1.1 Visi dan Misi.....	76
4.1.2 Struktur Organisasi.....	77
4.1.3 Uraian Tugas.....	78
4.1.4 Sumber Daya.....	86
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	87
4.2.1 Identifikasi Informan.....	88
4.2.2 Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota dalam Pekanbaru Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.....	92
4.2.3 Faktor- faktor kendala yang mempengaruhi Pembinaan Atlet sejak usia dini pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.....	118

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022	10
Tabel 1.2. Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan	11
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	63
Tabel 2.2. Operasional Variabel.....	68
Tabel 3.1. Informan Dalam Penelitian	71
Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Tesis	75
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Pendidikan pada Akhir Tahun 2021	86
Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru Menurut Pangkat/ Golongan pada Akhir Tahun 2021.....	87
Tabel 4.3. Jumlah Aset Dinas Pemuda dan Olahraga Pada Akhir Tahun 2021	88
Tabel 4.4. Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin.....	90
Tabel 4.5. Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat pendidikan.....	91
Tabel 4.6. Anggaran Program Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar Kota Pekanbaru	96
Tabel 4.7. Jumlah Sarana Olahraga Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan melalui olahraga dapat dilakukan pembangunan karakter suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang olahraga, pada bulan September 1981 pemerintah secara khusus mencanangkan program “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Seiring dengan ini dua tahun kemudian, tahun 1983 pemerintah membentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga (Kantor Menpora) dan pada tingkat daerah juga terbentuk Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan tugas pokok antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan mengenai asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, wewenang Provinsi dalam urusan olahraga adalah

dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta menetapkan cabang olahraga yang dibina Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan dan merekomendasikan atlet pelajar yang akan ikut seleksi serta mengkoordinasikan proses perpindahan sekolah bagi atlet yang diterima untuk dibina dalam wadah binaan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah termasuk dalam urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar guna mewujudkan kemampuan daerah mengembangkan kegiatan keolahragaan secara mandiri. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga dan meningkatkan prestasi untuk kemajuan pembangunan olahraga, beberapa permasalahan perlu diidentifikasi. Majunya olahraga suatu daerah atau bangsa bisa dilihat dari segi bagaimana manajemen dan pembinaan yang dilakukan oleh DISPORA.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Dijelaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tersebut bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, teradu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan

keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh.

Olahraga sendiri bersifat universal. Dengan kata lain olahraga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak memandang suku, ras, agama, latar belakang pendidikan, status ekonomi maupun gender. Baik laki laki maupun perempuan dapat melakukan aktifitas olahraga tanpa pengecualian, yang kemudian jika ini diterapkan di Provinsi Riau sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi masyarakatnya.

Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk

menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Dalam pemberdayaan masyarakat bidang olahraga, ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, yang kemudian mempunyai fungsi untuk membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahapantahapan pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan.

Dalam pemberdayaan masyarakat bidang olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mempunyai fungsi untuk membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi terciptanya atlit-atlit yang profesional. Pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahapan tahapan pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan.

Pembinaan atlet usia dini seyogyanya dapat menjadi program strategis di berbagai daerah. Sebab, tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Pembinaan atlet

usia dini, bisa dilakukan melalui pemanduan dan identifikasi bakat. Pemanduan bakat adalah proses awal mendapatkan bibit atlet berbakat yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi di kancah internasional. Sedangkan identifikasi bakat adalah instrumen tes yang disusun khusus untuk satu cabang olahraga (cabor) sehingga hasil tes lebih spesifik berdasarkan nomor-nomor pada cabor tertentu. Tujuannya untuk mengidentifikasi bakat calon atlet berprestasi. Mengetahui cabor yang sesuai dengan potensi anak dan memperkirakan peluang keberhasilan calon atlet dalam pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 tahun 2016 tentang rincian Tugas dan Tata Kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru adalah: “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kepemudaan dan Olahraga”, sedangkan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pengorganisasian, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

- 5) Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 6) Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olahraga regional/nasional, internasional;
- 7) Pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- 9) Pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- 10) Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- 11) Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan sifat dan keperluannya;
- 12) Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru memiliki peranan dalam pembinaan atlet berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Dispora mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan. Ada beberapa uraian tugas Dispora diantaranya pengaggaran pendataan, pelatihan, fasilitator, hingga pemberian dukungan.

Melalui beberapa uraian tersebut, diketahui bahwa Dispora memiliki peranan yang luas mengenai pembinaan olahraga dan kepemudaan. Tetapi Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak hanya diprioritaskan pada aspek peningkatan prestasi olahraga saja, namun upaya peningkatan kesehatan juga mendapat perhatian dalam sistem keolahragaan.

Ditengah keterbatasan anggaran, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru terus melanjutkan program pembinaan, membimbing para atletnya guna meraih

prestasi olah raga setinggi-tingginya dimulai sejak usia dini, yakni di tingkat sekolah. Pembinaan ditingkat sekolah yakni penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Potensi (atlet) seluruhnya bermuara di sekolah, dimana pembinaan yang efektif harus baik dilakukan dari tingkat awal atau dasar.

Dalam pembinaan atlet, Saat ini sudah ada Sumber Daya Manusia (SDM) asli binaan Dispora Pekanbaru yang mewakili Indonesia di tingkat Internasional, yakni pada cabang olah raga (Cabor) Atletik atau lempar lembing. Dispora memang memiliki kewenangan untuk di tingkat pelajar, sementara untuk level umum itu kewenangan KONI. Dispora memperkuat koordinasi dengan level pelatih. Dalam setiap koordinasi Dispora kerap menekankan untuk mengedepankan disiplin. Untuk di tingkat daerah, Semua cabor berprestasi, mulai dari cabor, tenis meja, tenis lapangan, catur, sepak bola hingga atletik.

Untuk informasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas sederajat se Kota Pekanbaru dengan Tingkatkan Prestasi, Junjung Tinggi Sportifitas Membangun Sumber Manusia yang Madani baru saja dimulai pada 22 April 2017 lalu.

Partisipasi anak usia dini dalam olahraga semakin terlihat, terbukti dengan semakin banyaknya dibuka klub-klub/perkumpulan olahraga atau sekolah-sekolah olahraga sejak usia dini (untuk proses pembinaan). Target yang harus dicapai atlet usia dini dalam kegiatan olahraga adalah menerapkan sebaik mungkin keterampilan dan kemampuan yang sudah dilatihkan kedalam pertandingan.

Penerapan Pembinaan Mental Bagi Atlet Usia Dini Dalam Pertandingan/Perlombaan, sebagai berikut:

1. Selalu mendukung secara positif terhadap setiap peningkatan yang dicapai anak latih;
2. Selalu mengedepankan kegembiraan dalam setiap pertandingan yang diikuti (baik menang maupun kalah);
3. Berikan pujian atau hadiah setiap keberhasilan yang dicapai anak (tidak harus dalam bentuk barang);
4. Berikan penghargaan kepada anak dalam setiap keikutsertaan dalam pertandingan (baik sebagai juara maupun sebagai partisipan);
5. Jangan memberikan target/beban yang berlebihan/diluar kemampuan anak dalam pertandingan (menampilkan keterampilan yang telah dilatihkan);
6. Segera berikan perhatian dan motivasi pada anak yang mengalami depresi akibat kekalahan dalam pertandingan.

Provinsi Riau memiliki lebih kurang 14 cabang olahraga dengan pemusatan latihan yang masih tersebar, tersebar dimaksud yaitu latihan yang diadakan di daerah daerah kabupaten di Provinsi Riau. Pengcab adalah pengurus cabang pemusatan latihan yang dilaksanakan di daerah daerah kabupaten dan kota, atlet terbaik dari kabupaten dan kota akan diseleksi untuk mengikuti program Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Mahasiswa (PPLM) yang bina oleh Dispora. Dan dari pusat pelatihan tersebut disaring untuk mengikuti Pusat Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Dispora (PPOD), PPOD adalah pusat latihan dimana atlet atlet ini akan di tujukan untuk mengikuti pertandingan tingkat nasional. Dari data yang dikutip, pemusatan latihan

pelatda ini memiliki 9 (sembilan) cabang olahraga. Diantaranya Cabor Senam, Angkat Berat dan Angkat Besi hingga Dayung dan Panahan.

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam meningkatkan prestasi atlet muda atau pelajar melalui program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang diterapkan oleh Dispora, bertujuan untuk :

1. Menciptakan Atlet berbakat dan berprestasi di tingkat Nasional maupun Internasional serta bisa mengharumkan nama Bangsa dan Negara.
2. Membina atlet yang tangguh dan mampu bersaing dengan atlet-atlet lainnya sehingga mempunyai prestasi yang tinggi npada kejuaraan-kejuaraan Nasional, PON, Sea games dan Kejuaraan Internasional.

Berikut arah kebijakan pembangunan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatkan reformasi birokrasi	Meningkatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan bimbingan teknis	Peningkatan reformasi birokrasi yang difokuskan pada peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan bimbingan teknis
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang difokuskan pada pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja.
2	Peningkatan peran serta	Meningkatnya peran serta	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif;	Meningkatan organisasi kepemudaan yang aktif

pemuda dalam pembangunan daerah	pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatnya prestasi olahraga yang ada.	Meningkatan Prestasi Olahraga yang ada
---------------------------------	---------------------------------	--	--

Sumber : Renstra Dispora Kota Pekanbaru, 2018-2022.

Dilihat dari dasar pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, Tujuan dari pelaksanaan pemusatan ini antara lain:

1. Agar terciptanya Atlit atlit yang berprestasi dan tangguh ditingkat daerah, Nasional, dan Internasional.
2. Dengan lahirnya atlit atlit yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan medali yang kita peroleh sehingga dapat menaikan peringkat Provinsi Riau pada Pekan Olahraga Nasioanal.

Bertolak dari pemusatan yang sedang dalam proses menuju tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang di buat oleh Dispora Kota Pekanbaru, sebelumnya Pemusatan atlit ini hanya dibuat untuk beberapa cabang olahraga yang di andalkan oleh Dispora Pekanbaru dan hanya untuk pelajar saja, tujuannya yaitu untuk menemukan bibit baru dari bakat yang telah dimiliki oleh atlit tersebut.

Uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pancapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut pencapaian kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru Tahun 2019 dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 : Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pembinaan dan pemasarakatan Olahraga				
1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	511.987.400	510.623.200	99,73
2	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	232.274.000	232.274.000	100,00
3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	38.300.000	38.300.000	100,00
4	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	579.262.600	577.742.600	99,73
5	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	138.615.350	138.228.100	99,72
6	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	92.877.600	92.877.600	100,00

Sumber : Renja Dispora Kota Pekanbaru, 2020.

Dari tabel 1.2 diatas, sebagaimana anggaran yang terpakai, serta pencapaian dari pelaksanaan even dan pembinaan atlit, bahwa bidang keolahragaan hanya fokus kepada even. Artinya, atlit yang diperoleh untuk mewakili Kota Pekanbaru hanya dari penyelenggaraan even olahraga. Seharusnya bidang keolahragaan mensurvey setiap daerah dalam mencari bibit atlit. Masalah tersebut menimbulkan fenomena di masyarakat, yakni masalah pendanaan atau pemenuhan anggaran yang dibutuhkan tidak jelas. Sehingga masalah masalah tersebut menimbulkan:

1. Tidak meratanya yang berpartisipasi sebanyak 1322 atlit dari 12 kabupaten/kota. Cabang olahraga yang diperlombakan, pencarian bibit atlit di seluruh pelosok daerah, karena pengambilan bibit atlit lebih banyak di daerah perkotaan saja;
2. Fasilitas yang kurang memadai, dan
3. Manajemen yang kurang baik.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian karena selain fenomena tersebut diatas, fenomena mengenai masalah kesejahteraan juga merupakan hal umum dan dapat mempengaruhi pembibitan atlet yang berujung pada kurangnya atlet berprestasi. Dimana masa depan dan kesejahteraan atlit selama ini tidak jelas. Sehingga orang tua yang anaknya memiliki bakat untuk menjadi atlit, mengarahkan anaknya untuk fokus bersekolah daripada menjadi atlit. Fenomena ini menyebabkan tidak seluruh atlit di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru yang benar-benar memiliki talenta fokus menjadi atlet. Hal ini menyebabkan lambatnya pembinaan atlet yang seharusnya dibina sejak kecil, lebih banyak benar-benar dibina ketika dewasa atau setelah SMU.

Secara umum, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dihadapkan pada beberapa permasalahan pada bidang bina kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut :

1. Belum adanya keterpaduan kegiatan/program kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Riau terutama di Kabupaten dan Kota yang disebabkan belum adanya perencanaan yang baik;

2. Lemahnya kreativitas, kemauan dan kemampuan pemuda untuk mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif;
3. Masih kurangnya minat pemuda untuk melakukan berbagai kegiatan dan program kepemudaan yang berdampak pada terhambatnya proses kaderisasi pemuda dalam menduduki pergantian kepemimpinan;
4. Masih rendahnya minat masyarakat terutama kaum remaja dalam melaksanakan kegiatan pemasaran olahraga dan olahraga prestasi sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan daerah dalam meraih prestasi dalam berbagai event pertandingan olahraga;
5. Rendahnya kemampuan pelatih olahraga prestasi untuk melakukan pembinaan olahraga di provinsi Riau, terutama di Kabupaten dan Kota;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung, pembibitan dan pembinaan olahraga, baik di sekolah, maupun di masyarakat;

Adapun kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pembentukan tim seleksi dan pelaksanaan seleksi atlet yang akan dimasukkan kedalam pemusatan latihan.
2. Pelaksanaan pemusatan latihan atlet.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemusatan latihan atlet.
4. Melakukan *try out* keluar daerah untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet.

5. Melakukan pengadaan barang / jasa yang telah di anggarkan.

Untuk mendapatkan atau menciptakan atlet atlet yang berkualitas perlu proses dan memerlukan waktu yang panjang tentunya dimulai dari perencanaan, pembinaan yang berkesinambungan yang lebih profesional serta dukungan dana. Serta tidak kalah pentingnya sarana dan prasarana yang memadai. Pembinaan ini dilakukan sejak dini dan berkesinambungan terhadap atlet atlet yang akan dibina melalui perekrutan yang profesional dan transparan sehingga diharapkan kedepan akan muncul atlet atlet Pekanbaru yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik Provinsi Riau. Pembinaan dalam dunia olahraga tak bisa dilakukan secara instan. Pembinaan sejak usia dini menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kelangsungan prestasi baik dari tingkat daerah hingga Internasional.

Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sudah sejak lama membangun kekuatan olahraga di Riau. Salah satunya melalui program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Melalui program PPLP inilah, Pemerintah menggali potensi-potensi atlet sejak usia dini. Mereka dibina dan dilatih sesuai standar yang diharapkan dari seorang atlet. Kendati belum seluruh cabor mampu melahirkan atlet yang diharapkan berprestasi dilevel yang lebih tinggi, namun tidak sedikit atlet nasional yang lahir dari PPLP Riau ini. Beberapa Cabang Olahraga binaan PPLP Riau sudah membuktikan diri bahwa pembinaan usia dini sangat penting dilakukan.

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Pekanbaru untuk level PPLP, masih cukup disegani dikancah nasional. Persoalannya bagaimana program pembinaan PPLP ini terus berkembang ke beberapa cabor lain, banyak bibit atlet yang saat ini tersebar disejumlah pelosok di Riau. Banyak sebenarnya bibit-bibit yang belum terpantau. Oleh karena itu, peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pencari bakat ataupun bibit atlet harus maksimal lagi kedepannya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengenai peranan Bidang Olahraga Dispora dalam pembinaan pemuda dan keolahragaan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam hal melakukan kebijakan pembinaan atlet yang bertujuan untuk menunjang prestasi atlet dirasa perlu dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, pembinaan dilakukan pada saat akan di laksanakan event keolahragaan, tidak ada pembinaan yang dilakukan sebelumnya secara terprogram, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam merumuskan permasalahan penelitian, penulis memaparkan beberapa perumusan masalah yang cukup relevan untuk diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini?

2. Apa faktor kendala yang mempengaruhi Pembinaan Atlet sejak usia dini pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang mempengaruhi Pembinaan Atlet sejak usia dini pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, maka harapan dari penulis adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa konsep, metode, proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi ilmu pemerintahan dan masyarakat di bidang Pemuda dan Olahraga terutama Pembinaan Atlet sejak usia dini.
2. Kegunaan Teoritis Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bidang ini dimasa yang akan datang.
3. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah dalam

mengefektivaskan pembinaan atlet usia dini di kota Pekanbaru, dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada suatu organisasi khususnya dalam organisasi olahraga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).¹ Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:²

¹ Inu Kencana Syafie, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 8.

² Bayu surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 9-10.

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.³

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.⁴ Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama.

³ Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21

⁴ Talizidhuhu Ndraha, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6.

Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.⁵

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Pasolong menjelaskan bahwa birokrasi adalah organisasi yang dipimpin oleh pejabat pemerintah dibawah menteri yang memiliki tugas utama sebagai pemberi pelayanan. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi yang berbeda.⁶

Tugas pokok birokrasi adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang diambil pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Organisasi sektor publik atau birokrasi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang organisasi sebagai mesin menekankan pada perlunya kecepatan, ketelitian, kejelasan, keteraturan, keandalan dan efisiensi yang dicapai dengan cara

⁵ Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2007, Jakarta : Kelapa Gading Permai, hal. 24.

⁶ Supriadi Legino, Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi : Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral, 2009, Jakarta : Indonesia Press.

membangun divisi-divisi, hierarki dan berbagaiaturan sebagai bentuk pembagian kerja yang tegas.⁷

Sedangkan sudut pandang organisasi sebagai makhluk hidup memiliki cara pandang bahwa tidak adasatu jenis organisasi yang dapat menjawab berbagai masalah dan cocok untuk semua kondisi sehingga organisasi dapat terus beradaptasi terhadap lingkungannya yang dinamis. Menurut Jeddawi birokrasi disusun sebagai hierarki otoritas yang terelaborasi, yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci, yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparat pemerintah.

Ciri utama dari struktur birokrasi adalah adanya prinsip pembagian kerja, struktur hierarkis, aturan dan prosedur, prinsip netral dan tidak memihak, penempatan berdasarkan karier dan birokrasi murni. Dengan adanya paradigmapbaru, birokrasi memiliki ciri-ciri tambahan, yaitu mengarahkan, memberdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik. Menurut Tamin, terdapat empat fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu:⁸

1. Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan kebijakan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu.
2. Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, fisik, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.

⁷ Legino, S. 2009. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Jakarta: Indonesia Press, hlm. 53.

⁸ Tamin, F. 2014. *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta : Belantika, hlm. 56-57.

3. Fungsi katalis public interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan ke dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah.
4. Fungsi entrepreneurial, yaitu memberikan inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal dan menciptakan resource-mix yang optimal untuk mencapai tujuan.

2.1.2 Konsep Kewenangan Pemerintah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁹

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah

⁹ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁰

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹¹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹²

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar

¹⁰ Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26

¹¹ Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 35-36

¹² *Ibid.* Hlm 37.

konstitusi (*inkonstitusional*). J.G. Brouwer dan A.E. Schilder menjelaskan bahwa delegasi kewenangan adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.¹³ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada

¹³ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185

organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.¹⁴

Philipus Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.¹⁵

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk

¹⁴ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau (terjemahan Sumardjo) adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.¹⁶

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya

¹⁶ Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Buku Seru: Yogyakarta, Hal. 15

adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler bahkan menyatakan bahwa¹⁷ pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje¹⁸ menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Oleh Ndraha, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:¹⁹

1. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

¹⁷ Ryias Rasyid.M, 2000. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal.192

¹⁸ *Ibid*, Hal, 194.

¹⁹ Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 2. Jakarta : PT Rineka Cipta, Hal. 85.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.²⁰

2.1.3 Konsep Kebijakan

Kerangka teori dibutuhkan untuk peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kebijakan.

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

²⁰ Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru, Hlm. 27

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²¹

Beragam batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.²²

Menurut Riant Nugroho D, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik.²³ Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan.²⁴

²¹ Wahhab, Abdul Solichin, 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Hlm.3.

²² Wibawa, Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 57.

²³ Rian Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta, Hlm. 63.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 73

Berikut ini adalah 10 pengertian kebijakan publik menurut Hogwood & Gunn, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*).
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*).
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*).
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*).
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*).
6. Kebijakan sebagai program (*as programme*).
7. Kebijakan sebagai keluaran (*as output*).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*).
9. Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*).
10. Kebijakan sebagai proses (*as process*).

Menurut Anderson ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum. Selain itu, ahli politik lainnya, Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda.²⁶

²⁵ Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta. Hlm.70.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 29

Kemudian Harold Laswell²⁷ juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah. Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Dalam merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan yaitu:²⁸

1. Model Kelembagaan;
2. Model Elit;
3. Model Kelompok;
4. Model Rasional;
5. Model Inkremental;
6. Model Teori Permainan;
7. Model Pilihan Publik;
8. Model Sistem

Dalam suatu pemerintahan, kebijakan yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal sebut disebabkan karena implementasi kebijakan pemerintah berusaha mewujudkan kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Sedangkan suatu kebijakan pemerintah akan berhasil apabila dilaksanakan dan menghasilkan dampak positif dari masyarakat banyak. Kebijakan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan,²⁹ yaitu:

1. Kebijakan Umum

²⁷ Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Buku Seru: Yogyakarta, Hlm. 68

²⁸ *Ibid*, Hlm. 76

²⁹ Yusri Munaf, 2016. *Op.Cit*, Hlm. 45.

Kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif, maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan yang bersifat relatif. Dalam suatu wilayah negara, kebijakan umum diambil dalam bentuk peraturan perundang-undang atau keputusan presiden. Sedangkan untuk suatu provinsi, kota, ataupun kabupaten, selain dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dari tingkat pusat, juga ada keputusan gubernur atau peraturan daerah yang telah disepakati oleh DPRD. Artinya, agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan kebijakan yang berada dibawahnya.

2. Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang- undang, atau keputusan menteri yang menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari suatu kebijakan pelaksanaan. Sedangkan untuk tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, keputusan bupati atau kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur, bisa menjadi suatu keputusan kebijakan pelaksanaan.

3. Kebijakan Teknis

Kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kedua yaitu kebijakan pelaksanaan, dan ketiga atau yang terbawah adalah kebijakan teknis.

2.1.3.1 Kebijakan Pemerintah Bidang Keolahragaan

Kebijakan bidang keolahragaan merupakan upaya-upaya pemerintah memotivasi dan memfasilitasi masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan usia gemar dalam kegiatan berolahraga, serta mampu menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat, yang bertujuan meningkatkan budaya berolahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pembangunan dan pengembangan keolahragaan, hasil utama yang harus dicapai ialah terumuskannya kebijakan yang mendukung penuh pembangunan dan perkembangan olahraga nasional, yang berpedoman melalui mekanisme pembinaan olahraga, dan kesegaran jasmani, serta tersusunnya rancangan undang-undang untuk mendukung pembangunan dan perkembangan keolahragaan nasional baik melalui sektor ekonomi keolahragaan, industri keolahragaan, ketenaga ahlian keolahragaan, manajemen keolahragaan, hingga proses pembinaan berbasis aktif berolahraga (*sport active*) ditiaptiap cabang olahraga baik dari segi pendidikan maupun prestasi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, hal tersebut merupakan dasar bagi setiap pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selalu menaati, dan melaksanakan isinya, sehingga apa yang dicita- citakan oleh bangsa Indonesia, khususnya dibidang keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Selain Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 sebagai payung hukum yang kuat dalam keolahragaan nasional, pemerintah juga memiliki beberapa kebijakan yang tertuang dalam undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Penjabaran bebarapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah maupun pelaku olahraga untuk pembinaan olahraga menurut KONI (2014:19), sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pembangunan dan perkembangan olahraga merupakan suatu pencapaian yang berdampak positif, serta mampu bersinergi dengan pembangunan lainnya. Pembangunan dan perkembangan olahraga dapat dilakukan melalui berbagai sektor mulai dari sektor sumber daya manusia, pendidikan, rekreasi, prestasi, industri, ekonomi, manajemen yang berbasis pada prinsip dasar perkembangan olahraga.

2.1.4 Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah

ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.³⁰

Menurut Rosenweg organisasi dapat dipandang sebagai:³¹

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo³² *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah organisasi yang

³⁰ Siagian Sondang, 2007, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Hal.6.

³¹ Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press, Hal.31

³² Syafii Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara. Hal.114.

bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.³³

Menurut Sondang Siagian, mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.³⁴

Menurut Hamim organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran

³³ *Siagian, Sondang*, Op.Cit, Hal. 141.

³⁴ *Ibid*, Hal. 25.

terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.³⁵

Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

2.1.5 Konsep Peranan Organisasi

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.

³⁵ Sufian Hamin, *Op.Cit*, Hal. 24.

Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.³⁶

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Atas dasar tersebut Soekanto menyimpulkan bahwa sesuatu peranan mencakup paling sedikit tiga aspek,³⁷

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

³⁶ Rivai, Veitzal., 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Hal.148.

³⁷ Soerjono Soekanto. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafmdo Persada, Hal. 234.

Menurut Abdulsyani peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.³⁸

Miftah Thohah³⁹ Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan perturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

³⁸ Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta, Hal. 94.

³⁹ Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung. Hal.53.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁴⁰

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.⁴¹

Menurut Biddle dan Thomas teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:⁴²

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

⁴⁰ Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 234.

⁴¹ *Ibid*, hal. 236.

⁴² *Ibid*, Hal. 241.

- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepetri, Arimbi dan Santosa, 2003:34).

2.1.5.1 Konsep dan Teori Peran

Narwoko peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan adanya beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Menurut Narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

⁴³ Bagong – Dwi Narwoko, J. 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta : Kencana Media Group, Hal 159.

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut:⁴⁴

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)”.

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraanya.

⁴⁴ Sarwono, S. W. 2002. Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Balai Pustaka, Hal 23.

Sejalan dengan hal itu untuk melihat peranan dari Tim Terpadu, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hendropusprio dikatakan bahwa peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁵

1. Peranan yang diharapkan (*expencted roles*) Yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Perana jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya; dan
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sedangkan teori yang juga serupa dan memungkinkan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *actual roles*, yang lebih menekankan bagaimana peranan itu dijalankan dalam tataran pelaksanaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada lokasi penelitian. Namun, penulis merasa bahwa teori *actual roles* justru berdampak pada lambatnya penyelesaian konflik dikarenakan pendekatan dalam teori ini lebih mengedepankan fleksibilitas dari penanganan konflik ini, sedangkan konflik horizontal yang terjadi sudah tergolong urgent untuk

⁴⁵ Bagong – Dwi Narwoko, J, Op.Cit, Hal.160.

segera diselesaikan mengingat kondisi di lapangan sudah terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan, yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik yang lebih serius seperti anarkisme pihak yang berkonflik.

Pendekatan dalam teori actual roles seperti yang telah dikemukakan juga belum tentu dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berkonflik karena teori ini melihat kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan resolusi konflik dapat dianggap wajar oleh masyarakat, hal ini jelas tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang penulis ketahui setelah pra riset dari penelitian ini.

2.1.6 Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.⁴⁶ Selanjutnya Nawawi menjelaskan bahwa, pengertian sumber daya manusia terbagi menjadi dua pengertian, yaitu makro dan mikro.⁴⁷

Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Sedangkan pengertian SDM secara mikro adalah manusia atau

⁴⁶ Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 3.

⁴⁷ Hadari Nawawi, 2003; Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 37

orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, karyawan, pekerja, pegawai, tenaga kerja, dan lainnya.⁴⁸

Berdasarkan uraian pengertian sumber daya manusia di atas, dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu di suatu organisasi. Sumber daya manusia sangatlah vital dalam segala aspek bidang keorganisasian, maupun suatu perusahaan. Pencapaian hasil yang didapatkan merupakan kinerja yang berasal dari ketersediaan SDM suatu organisasi atau kelembagaan. Oleh karena itu, selain memahami pengertian SDM baik secara makro maupun mikro, memperdalam aspek-aspek komponen yang terdapat dalam SDM juga sangat bermanfaat, seperti yang diungkapkan Hasibuan tentang pembagian komponen SDM, yang meliputi:⁴⁹

- 1) Pengusaha, ialah setiap orang yang menginvestasikan modal untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak bergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.
- 2) Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi:
 - a) Karyawan operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.

⁴⁸ *Ibid*, 38-39

⁴⁹ Hasibuan, Malayu, *Op.Cit*, Hal. 12.

- b) Karyawan manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai perintah.
- 3) Pimpinan, ialah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain, serta bertanggung jawab atau pekerjaan orang tertentu dalam mencapai suatu tujuan.

2.1.6.1 Pembinaan SDM Bidang Keolahragaan

Pembinaan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan dan pembinaan. Pembinaan merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi besar.

⁵⁰Pembinaan adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi (Simamora, 2006:273). Pembinaan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menuaikan pekerjaan yang lebih baik.⁵¹

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pelaku olahraga merupakan sumber daya manusia bidang keolahragaan. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

⁵⁰ Silalahi, 2000. *Penelitian Pembuatan Briket Kayu dari Serbuk Gergajian Kayu*. Hasil Penelitian Industri DEPERINDAG. Bogor, Hal. 249.

⁵¹ Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Hal. 273.

Setiap organisasi apapun bentuknya sanantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pembinaan sumber daya manusia atau anggota organisasi itu sendiri, ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara proporsional harus diberikan latihan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin.

Dari uraian diatas jelas, bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai dengan baik apabila anggota dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Sehingga untuk itu usaha pembinaan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan sangatlah diperlukan. Dinamika kegiatan keolahragaan akan sangat ditentukan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang menggerakkan roda kegiatan. Pembinaan SDM ini sudah mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan anggapan dasar yang berbeda. Dahulu SDM dianggap sebagai tenaga kerja yang diseting untuk efisiensi produksi, sehingga fungsinya sebagai instrumen. Sedangkan saat ini SDM ditempatkan sebagai modal kerja sehingga kemampuan, pengetahuan dan keterlibatannya dalam setiap pengambilan kebijakan lebih mendapat penekanan. Dengan demikian SDM dalam olahraga yang dimaksudkan mengacu pada ketersediaan pelatih olahraga dan instruktur olahraga tertentu.

Strategi pembinaan sumber daya manusia perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Pembinaan sumber daya manusia bidang keolahragaan merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk pelaku olahraga yang berkualitas

dengan memiliki keterampilan, kemampuan dan loyalitas kepada suatu organisasi. Era globalisasi seakan memberikan arus teknologi dan informasi serta mobilitas sumber daya manusia dari satu tempat ke tempat lain, salah satu pembinaan sumber daya manusia yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan.

2.1.7 Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar besarnya. (Asmaya, 2013:11).

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa:⁵²

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).

⁵² Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, cetakan ke-23. Jakarta : Rajawali Pers, Hal 16-17.

3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Menurut Thoha (2014:32) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Poerwodarminto, pembinaan adalah suatu proses menuju ke arah yang lebih baik. Pembinaan untuk cabang olahraga dengan adanya klub yang memang bertujuan untuk membina atlet usia dini dengan baik, sehingga nantinya atlet akan berkembang dengan maksimal.⁵³ Hal ini dilakukan dengan tujuan klub-klub yang membina atlet usia dini akan menciptakan atlet-atlet handal yang akan menjadi generasi yang akan datang, namun dalam membina anak usia dini tidak mudah karena anak usia dini masih cenderung ingin bermain. Apabila dalam proses pembinaan tersebut ada banyak hal yang tidak cocok dengannya, maka besar kemungkinan anak hanya mengikuti latihan dalam waktu yang singkat karena mereka tidak menyukai apa yang mereka lakukan dalam proses latihan.

⁵³ Poerwadarminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, Hal. 14.

Menurut Suharno, unsur-unsur yang perlu mendapat pembinaan dari seorang atlet agar dapat mencapai prestasi yang optimal adalah pembinaan fisik, pembinaan teknik, pembinaan taktik, mental, kematangan bertanding dan pembangunan keterampilan. Tidak ada tingkat kreativitas yang akan menghasilkan keberhasilan/sukses apabila landasan ilmiah praktek pelatihannya kurang sempurna Menurut Suharno.⁵⁴

“Pada umumnya faktor-faktor yang menentukan pencapaian prestasi maksimum adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen terdiri dari kesehatan fisik dan mental yang baik, penguasaan teknik yang sempurna, masalah-masalah taktik yang benar, aspek kejiwaan dan kepribadian yang baik dan adanya kematangan juara yang mantap. Sedangkan faktor-faktor eksogen meliputi pelatih, keuangan, alat, tempat, perlengkapan, organisasi, lingkungan dan partisipasi pemerintah”.

2.1.7.1 Pembinaan Atlet

Atlet menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan dalam beradu ketangkasan, kecepatan, keterampilan, dan kekuatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Menurut Poerwardarminta, atlet merupakan seseorang yang bersungguh-sungguh gemar berolahraga terutama mengenai kekuatan badan, ketangkasan dan kecepatan berlari, berenang, melompat dan lain-lain. Dari uraian di

⁵⁴ Suharno HP. 2005. Ilmu Kepelatihan Olahraga. Yogyakarta IKIP Yogyakarta, Hal. 2.

atas dapat disimpulkan bahwa, atlet merupakan individu yang berperan dalam suatu aktivitas dibidang keolahragaan dan bakat, keterampilan, maupun motivasi sangat dibutuhkan pada cabang olahraga tersebut untuk mencapai suatu prestasi yang setinggi-tingginya dan dikumpulkan dalam satu program pelatihan yang lebih khusus dan intensif sesuai dengan cabang olahraga masing-masing

Pembinaan Atlet Model pembinaan berbentuk piramid atau segitiga berporos, seringkali digunakan dalam proses pembinaan atlet yang berkesinambungan. Dikatakan berkesinambungan, karena pola pembinaan pada poros pyramid tersebut didasari oleh cara pandang yang utuh dalam memaknai program pemasalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasi. Artinya, program tersebut memandang arti penting proses pemasalan dan pembibitan yang berlangsung dalam pembinaan prestasi olahraga. Sebagai contoh, pada sekolah-sekolah yang menganut sistem keolahragaan biasanya memiliki program ekstra-kurikuler olahraga yang dikelola, dikembangkan, dan bekerjasama dengan klub-klub olahraga. Dengan demikian sekolah tersebut memiliki beragam aktivitas ekstra-kurikuler yang dapat memfasilitasi siswaswi dalam kegiatan olahraga, baik dalam bentuk olahraga individu, beregu, hingga pembinaan olahraga prestasi yang berkelanjutan, dan tak jarang hasil yang diperoleh berdampak positif dengan memunculkan bibit-bibit atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama sekolah hingga nama bangsa dan negara.

Klub-klub yang berorientasi pada proses pembinaan olahraga prestasi selain mengembangkan pembinaan secara tersendiri, biasanya menjadikan lahan pendidikan dalam sekolah dengan tujuan menjaring, dan mencari bibit-bibit atlet yang berpotensi untuk berprestasi dimasa yang selanjutnya. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang terdapat dalam satuan pendidikan, sehingga tidak merusak sistem proses pendidikan yang terdapat di dalam pembelajaran sekolah. Jika proses pembinaan olahraga mengikuti alur yang sesuai dan bersinergi saling mendukung antar satu kepentingan dan kepentingan lainnya, bukanlah suatu hal yang mustahil prestasi olahraga di Indonesia mampu bangkit dan berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia.

Karakteristik utama pembinaan olahraga khususnya pada pembinaan atlet olahraga prestasi selalu berorientasi jauh kedepan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, hingga menuju taraf Internasional. Perencanaan tersebut dapat dikembangkan dengan baik, apabila ditunjang dan ditumbuh kembangkan kedalam suatu sistem pembinaan yang mantap, terstruktur, dan sistematis. Sehingga mampu diorganisasikan untuk pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan.

Selanjutnya Soeharsono yang dikutip dalam Adisasmita dan Syarifuddin menjelaskan, aspek-aspek yang terkait dalam pembinaan olahraga meliputi.⁵⁵

⁵⁵Adisasmita, Y dan Aip Syarifuddin. (1996). Ilmu Kepelatihan Dasar. Jakarta, Depdikbud Dirjendikti. Proyek Pendidikan Tingkat Akademik, Hal. 88.

- 1) Aspek Olahraga Menyangkut permasalahan: pembinaan fisik, pembinaan teknik, pembinaan taktik, kematangan bertanding, pelatih, program latihan, dan evaluasi.
- 2) Aspek Medis Menyangkut permasalahan: Fungsi organ tubuh yang meliputi: (jantung, syaraf, paru-paru, otot, indera, dan lainnya), Gizi, Cedera, dan Pemeriksaan Medis.
- 3) Aspek Psikologis Menyangkut permasalahan: Ketahanan mental, Kepercayaan diri, Penguasaan diri, Disiplin dan semangat juang, Ketenangan, Ketekunan, Kecermatan, dan Motivasi.

Berdasarkan aspek-aspek pembinaan olahraga di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan dalam pembinaan olahraga diperlukan pakar-pakar yang berkompeten pada bidang keolahragaan. Pembinaan atlet merupakan upaya untuk memunculkan individu-individu bibit atlet yang berpotensi sehingga mampu mencapai prestasi maksimal dikemudian hari. Pembinaan yang dilakukan secara sistematis, tekun, dan berkelanjutan, diharapkan dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Harre yang dikutip dalam Adisasmita dan Syarifuddin bahwa, “pembinaan dimulai dari program latihan umum mengenai latihan dasar menarah pada pengembangan efisiensi olahraga secara komperhensif dan kemudian berlatih yang dispesialisasikan pada cabang olahraga yang ditekuninya”.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 70

Tanpa adanya yang terstruktur dan berkelanjutan dengan baik, dan dilakukan sepanjang waktu, maka hasil akan menunjukkan pada sesuatu hal yang mustahil seorang atlet dapat meraih puncak prestasi. Hal serupa juga dijelaskan Husdarta bahwa, atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang insentif hanyalah atlet yang:⁵⁷

1. Memiliki fisik prima;
2. Menguasai teknik yang sempurna;
3. Memiliki karakteristik psikologi dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya;
4. Cocok untuk cabang olahraga yang dilakukan;
5. Sudah berpengalaman berlatih dan bertanding selama bertahun-tahun.

Selanjutnya Ambarukmi menjelaskan bahwa, “pembinaan atlet menuju puncak prestasi dilakukan berdasarkan piramida prestasi olahraga yang terdiri atas tiga tahapan:⁵⁸

- a. Pemassalan,
- b. pembibitan,
- c. prestasi.

2.1.7.2 Pembibitan Atlet

⁵⁷ Husdarta. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan*. Bandung : Alfabeta, Hal. 75

⁵⁸ Ambarukmi, D. A. dkk. 2007. *Pelatihan Pelatih Fisik Level I*. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga. Kemenpora, Hal. 5.

Pembibitan atlet adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga dikemudian hari, sebagai langkah atau tahapan lanjutan dari pemassalan olahraga. Pembibitan yang dimaksud adalah penyemaian bibit, bukan mencari bibit.

Diibaratkan seorang petani yang akan menanam padi, ia tidak membawa cangkul mencari bibit ke hutan, tetapi melakukan penyemaian bibit atau membuat bibit dengan cara tertentu, misalnya seorang petani membuat sebidang tanah sebagai tempat pembuatan bibit yang akan ditanam.

Pembibitan atlet dapat dilakukan dengan melaksanakan identifikasi bakat (*talent identification*), kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan bakat (*talent development*). Dengan cara demikian, maka proses pembibitan diharapkan akan lebih baik. Ditinjau dari sudut pertumbuhan dan perkembangan gerak anak, kelanjutan akhir dari masa kanak-kanak, yaitu masa adolesensi. Dalam pembibitan atlet, seorang pelatih harus dapat dengan jeli melihat kemampuan tiap-tiap bakal calon atlet yang berpotensi untuk dapat lebih dikembangkan kemampuannya, sehingga nantinya diharapkan mampu menghasilkan prestasi tinggi dimasa selanjutnya. Sebagaimana yang dijabarkan Adisasmita dan Syarifuddin tentang, karakteristik bibit atlet unggulan, diantaranya:⁵⁹

- 1) Tingkat atau derajat atau mutu (kualitas) bawaan sejak lahir.
- 2) Bentuk tubuh (postur tubuh) yang baik, sesuai dengan cabang olahraga yang diminatinya.

⁵⁹ Adisasmita, Y dan Aip Syarifuddin. *Op.Cit*, Hal. 60

- 3) Fisik dan mental yang sehat.
- 4) Fungsi organ-organ tubuh yang baik seperti, syaraf, jantung, paru, otot, dan lainnya.
- 5) Kemampuan gerak dasar yang baik seperti, kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, koordinasi, power, dan sebagainya.
- 6) Penyesuaian dengan cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman-pengalaman yang baru dan dapat membuat pengalaman, dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk siap untuk dipergunakan apabila dihadapkan dengan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang baru atau dengan istilah lain “intelegensi diri”.
- 7) Sifat-sifat kejiwaan (karakter) bawaan sejak lahir yang dapat mendukung terhadap pencapaian prestasi yang prima, antara lain watak berkompetitif tinggi, kemauan keras, tabah, ulet, tahan uji, pemberani, dan semangat juang tinggi.
- 8) Kegemaran untuk berolahraga.

Berdasarkan karakteristik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk memperoleh atlet yang berpotensi dan berprestasi tinggi, pembibitan atlet harus dimulai sejak memasuki usia dini, dan pembibitan tersebut harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta karakteristik dari cabang olahraganya.

2.1.7.3 Pembinaan Prestasi

Dalam setiap cabang olahraga prestasi yang maksimal merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap klub atau atlet. Kenyataan menunjukkan bahwa prestasi yang dicapai oleh atlet akan mengharumkan nama atlet itu sendiri serta klub dan juga pelatih yang menanganinya. Pengertian Prestasi Olahraga itu sendiri menurut M. Furqon H, "Merupakan puncak penampilan atlet yang dicapai dalam suatu pertandingan atau perlombaan, setelah melalui berbagai macam latihan maupun uji coba. Kompetisi tersebut biasanya dilakukan secara periodik dan dalam waktu tertentu".⁶⁰

Pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya merupakan puncak dari segala proses pembinaan, termasuk dari proses pemassalan maupun pembibitan. Dari hasil proses pemassalan dan pembibitan, maka akan dipilih atlet yang makin menampakkan prestasi olahraga yang dibina.

Prestasi olahraga merupakan puncak penampilan atlet yang dicapai dalam suatu pertandingan atau perlombaan, setelah melalui berbagai macam penerapan pola program latihan yang dilakukan. Dari hasil pembinaan prestasi yang baik, maka akan bermunculan dan akan terpilih atlet yang berkualitas dengan indikasi-indikasi pencapaian hasil prestasi yang semakin meningkat. Untuk menjamin indikasi pencapaian hasil prestasi yang meningkat tentu bukan sesuatu hal yang mudah, karena selain dari proses pembinaan yang sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan,

⁶⁰ M. Furqon H & Muchsin Doewes. 2002. Pliometrik untuk Meningkatkan Power. Surakarta: Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Pasca Sarjana UNS, Hal. 4

masih ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil prestasi yang diraih oleh seorang atlet.

2.1.8 Konsep Teori Pemuda dan Usia Dini

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut Beichler dan Snowman, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 3-14 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.⁶¹

Suatu prestasi olahraga tidak serta merta datang dengan sendirinya. Hal ini tidak semua orang bisa memahami, bahkan mereka hanya berorientasi pada hasil kompetisi atau kejuaraan yang di tandai dengan perolehan medali, tanpa memperhatikan proses dari pembinaan yang dimulai dari usia dini. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan IPTEK olahraga, untuk memberikan jawaban yang ilmiah dan nyata bahwa prestasi merupakan hasil dari proses latihan dan pengembangan bakat.

Proses pengidentifikasian atlet yang berbakat dimulai sejak usia dini, kemudian mengikut sertakannya dalam program latihan yang terorganisir dengan baik

⁶¹ Ika Budi Maryatun, 2012. Peran pendidik PAUD dalam membangun karakter anak, (UNY), hlm. 747

merupakan hal yang paling utama dalam olahraga kontemporer. Setiap orang dapat belajar menari, menyanyi, melukis namun sangat sedikit yang mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Maka dari itu dalam olahraga seperti juga dalam seni sangat penting untuk menemukan seseorang yang berbakat menyeleksinya pada usia dini, memantaunya secara kontinyu, serta membantunya untuk mencapai tingkat penguasaan yang tertinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan Dan Fasilitas Kepada Atlet Dan Pelatih Atlet Berprestasi, mengidentifikasi bakat anak usia dini untuk menjadi atlet adalah anak-anak sekolah umur 7 –16 tahun dilakukan dengan tes yang sederhana. Karena tim pemandu bakat tidak mungkin dapat melakukan tes kepada siswa yang jumlahnya besar di seluruh sekolah, maka para guru pendidikan jasmani dapat ditugasi untuk melakukan proses identifikasi pada tahap awal. Pemantauan dilakukan kepada setiap individu siswa dari kelas 4, 5, dan 6 SD dan kelas 1, 2, dan 3 SLTP, dan SMU.

Sejalan dengan itu T H Motohir mengemukakan bahwa tes pemanduan bakat tahap II mencakup komponen sebagai berikut:

1. Penganalisaan hasil tes tahap pertama oleh petugas (tim pemandu bakat) ditingkat klub sekolah;
2. Seleksi siswa (sekitar 1-2%) terbaik untuk ikut tes kedua;

3. Tes tahap kedua (10 butir tes) untuk mengukur bentuk dan ukuran tubuh(antropometri) dan kemampuan fisik;
4. Tentukan profil siswa sesuai hasil tes;
5. Siswa yang memenuhi criteria, diarahkan memilih cabang olahraga yang sesuai;
6. Tes ini dapat dilakukan dipusat-pusat pembinaan olahraga ditingkat Kabupaten, Propinsi oleh petugas (tim pemandu bakat).

Sedangkan pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang Mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam hal olahraga, pemuda atau olahragawan adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik.

Untuk atlet usia dini perekrutan dan pembinaan serta pelatihan atlet dilaksanakan oleh Dispora, sedangkan untuk Pemuda yang usianya diatas 18 tahun dalam olahraga merupakan wewenang dari KONI daerah.

2.1.8.1 Pembinaan Atlet Usia Dini

Partisipasi anak usia dini di dalam bidang olahraga semakin terlihat, terbukti dengan semakin banyaknya dibuka klub-klub olahraga atau sekolah-sekolahsepakbola bagi anak usia Sekolah Dasar. Dalam institusi pendidikan

punsemakin diperhatikan sarana dan prasarana kompetisi olahraga, bahkan sampaidengan kompetisi olahraga usia dini tingkat nasional.Keterlibatan atlet usia dini dalam kompetisi olahraga ini tidak dapat terlepas dariketerlibatan orang dewasa sebagai pelatih, pembina maupun sebagai orangtuaatlet. Oleh karena itu program pelatihan olahraga usia dini merupakan suatusistem sosial yang kompleks.

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Didalam olahraga usia dini biasanya dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya.⁶²Dalam pembinaan usia dini ada banyak kasus dimana prestasi atlet meningkat dengan cepat namun setelah itu prestasinya menurun, hal ini disebabkan atlet usia dini yang belum waktunya diberi program latihan yang belum saatnya diberikan. Pada usia dini seharusnya dilatih dengan prinsip perkembangan menyeluruh terlebih dahulu, agar nantinya bisa mencapai prestasi puncak yang diharapkan.

Bloomfield, Ackland dan Elliot mengemukakan bahwa pengidentifikasian bakat dapat dilakukan dengan cara sederhana dan secara canggih. Bempa (1990: 334) mengemukakan dua metode dalam mengidentifikasi bakat calon atlet, yaitu (1) seleksi alam; dan (2) seleksi ilmiah.⁶³

Metode seleksi alami, dipertimbangkan sebagai metode dengan pendekatan normal dalam pengembangan potensi atlet. Metode ini berasumsi bahwa atlet yang

⁶² Hibana Rahman. 2002. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta : PGTKI Press, Hal, 9.

⁶³ Bempa Tudor O. (1990). *Theory And Methodology Of Training*. Debuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company, Hal. 334.

mengikuti aktivitas olahraga merupakan hasil pengaruh lokal (tradisi sekolah, keinginan orang tua, ataupun keinginan kelompok sepermainannya), sehingga pencapaian atas perubahan prestasi atlet ditentukan atau tergantung pada pilihan yang bersifat alami. Oleh karena itu, perubahan prestasi atlet sering kali sangat lamban, hal ini disebabkan atlet telah melakukan pilihan cabang olahraga yang tidak tepat baginya. Sehingga perubahan kemampuan seorang atlet ditentukan oleh seleksi alamiah yang tergantung pada berbagai faktor, individual, kebetulan, seorang atlet dalam mengambil cabang yang sesuai dengan bakatnya. Maka dari itu sering terjadi perkembangan kemampuan atlet sangat lambat, diakibatkan karena pemilihan cabang olahraga yang tidak sesuai.

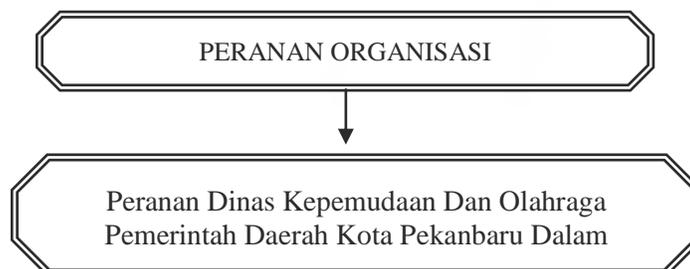
Sedangkan metode seleksi ilmiah, merupakan metode pemilihan calon atlet yang dilakukan pelatih terhadap para remaja prospektif didukung dengan bukti-bukti bahwa calon atlet mempunyai kemampuan alami untuk cabang olahraga yang dilatihkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk meraih prestasi puncak bagi calon atlet yang dipilih secara ilmiah lebih singkat, bila dibandingkan dengan calon atlet yang dipilih melalui metode alami.

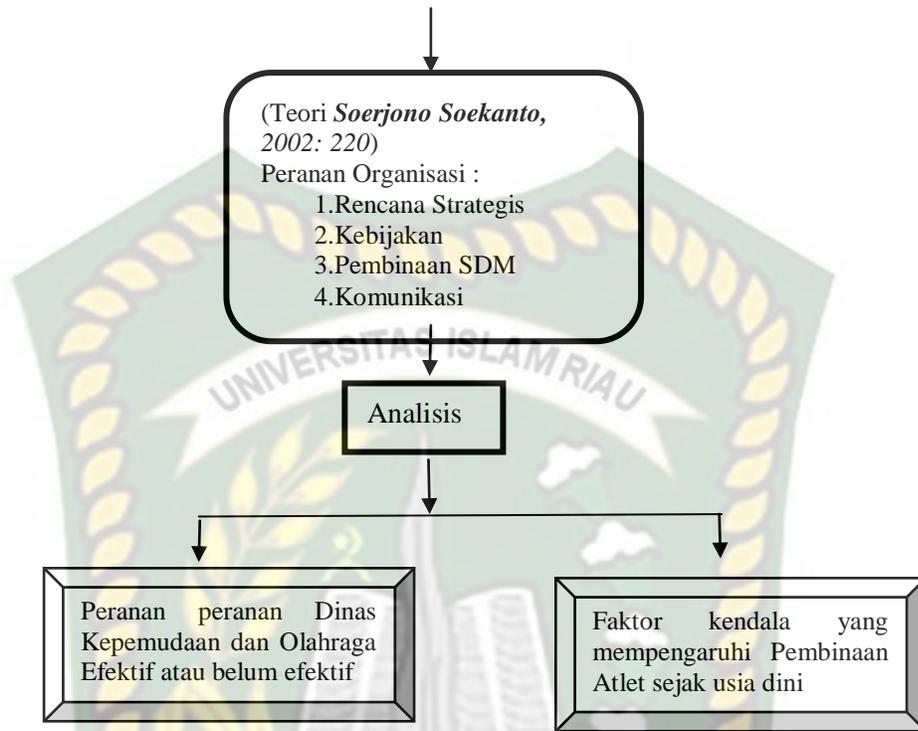
Berdasarkan pernyataan di atas, metode pemilihan calon atlet yang dilakukan secara ilmiah sudah selayaknya mendapatkan pertimbangan secara ketat, khususnya bagi cabang olahraga yang memerlukan persyaratan tinggi dan berat badan (seperti: bola basket, bola voli, sepak bola, mendayung, lempar lembing, dsb), Hal yang sama dapat pula ditujukan pada cabang olahraga lain yang memerlukan kecepatan, waktu

reaksi, koordinasi dan power yang dominan. Dengan bantuan ilmuwan olahraga, kualitas yang dibutuhkan dapat dideteksi, dan sebagai hasil pengujian ilmiah yang dilakukan oleh profesional yang berkompeten di bidangnya, calon atlet berbakat dapat dipilih secara ilmiah dan selanjutnya dapat diarahkan pada cabang olahraga yang sesuai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan oleh peneliti dalam proses sistematika dan alur pemikiran sebuah penelitian. Bahwa peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tidak ada melakukan pembinaan jangka panjang, atlet dibina saat ada event saja, oleh karena itu peneliti menggunakan teori peranan organisasi menurut Soerjono Soekanto karena didalamnya terkait dengan indikator harus adanya rencana strategis untuk jangka panjang pembinaan terhadap atlet usia dini, kemudia perlunya indikator kebijakan dalam menetapkan suatu aturan, selanjutnya pentingnya indikator pembinaan SDM lebih pelatihnnya selanjutnya indikator komunikasi, agar dapat berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dalam pencarian bibit. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut ini, yaitu sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah terlampir tabel penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan melakukan penelitian terkait dengan Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

Nama dan Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Hubungan/ Persamaan
1	2	3	4
<p>Muhammad Riau Bintana Yusnadi, <i>“Kebijakan Pembinaan Atlet Oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang”</i>. <i>(Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH ISSN-2354 -5798 Vol.5 No. 1 Juni Tahun 2017)</i></p>	<p>Penelitian ini mengkaji bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang belum membangun tujuan kedepan, apa yang akan dilakukan atlet tersebut setelah atlet itu mengikuti event. Tidak adanya perencanaan pembinaan kedepan kepada atlet tersebut. Sehingga atlet tersebut hilang begitu saja setelah mengikuti event. Selanjutnya dalam menciptakan rencana pengembangan dengan mencari bibit-bibit berpotensi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang masih belum dilakukan secara maksimal, dimana pencarian bibit-bibit dilakukan pada saat akan di adakannya kompetisi/event. Tidak ada kebijakan pencarian bibit-bibit tersebut yang dilakukan jauh-jauh hari sehingga peluang akan mendapatkan bibit yang berpotensi kedepanya itu lebih besar</p>	<p>Penelitian ini hanya membahas tentang Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dalam Pembinaan atlet saja, sedangkan pada penelitian berikutnya dibahas mengenai pembinaan atlet usia dini yang berkaitan dengan peranan Dispora tersebut.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan kebijakan yang diambil dari Dinas Pemuda dan Olah raga dalam pembinaan atlet dengan jenis penelitian deskriptif analitis.</p>
1	2	3	4
<p>Vikky Hardikaningsih, <i>“Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan Atlet Usia Dini Pada Klub Olahraga Bolavoli Di Kabupaten Banjarnegara”</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pembinaan atlet usia dini pada klub bolavoli di kabupaten Banjarnegara dan faktor yang paling menghambat adalah faktor kompetisi diikuti oleh faktor alat dan fasilitas serta faktor organisasi. Halhal yang harus</p>	<p>Pada penelitian ini membahas tentang faktor penghambat bagi atlet usia dini khusus pada cabang Bolavoli, sedangkan pada penelitian selanjutnya dibahas tentang bagaimana pembinaan selanjutnya terhadap atlet usia dini setelah mereka tidak lagi</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan teori atlet usia dini dan tugas dari Dispora dalam pengembangan atlet usia dini.</p>

<p><i>(Jurnal Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 201)</i></p>	<p>diperhatikan adalah sebagai berikut: Perlu menambah pelaksanaan kompetisi bolavoli khususnya kompetisi untuk anak usia dini, karena memang masih sangat kurang pelaksanaannya dan Melengkapi dan meningkatkan alat dan fasilitas latihan.</p>	<p>mengikuti olahraga, apa yang menjadi peran dari Dispora dalam pembinaan tersebut.</p>	
<p>Jarot Sutrisno</p> <p><i>Peran Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Pontianak</i></p> <p><i>(Jurnal Tesis PMIS-UNTAN – IAN 2012)</i></p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dalam peran Dispora hanya khusus membahas tentang bagaimana cara meningkatkan prestasi olahraga, sedangkan pada penelitian selanjutnya, akan dibahas mengenai peran Dispora dalam pembinaan Atlet usia dini.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan Peran Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan tentang bagaimana peran dispora dalam menangani atlet.</p>
1	2	3	4
<p>Rangga Aditya Putra</p> <p><i>Analisis Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Sepakbola Di Akademi Triple's U-17 Kabupaten Kediri</i></p>	<p>Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa sarana dan prasarana, program latihan dan sumber daya manusia yang ada di Akademi Triple's U-17 Kabupaten Kediri sudah sangat baik sehingga dapat mendukung para atlet untuk berkompetisi dan berprestasi ditingkat kabupaten ,</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini pembinaan hanya ditujukan pada satu cabang olah raga saja, sedangkan pada penelitian selanjutnya, akan dibahas mengenai peran Dispora dalam pembinaan Atlet usia dini.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan teori pembinaan secara keseluruhan tentang pembinaan atlet dan prestasi atlet.</p>

<p>(<i>Jurnal Kesehatan Olahraga Vol. 06 NO. 2 Edisi Oktober 2016 hal 433 - 440</i>)</p>	<p>karesidenan maupun tingkat provinsi.</p>		
<p>Aldian Jatmoko <i>Peran Dispora Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)</i> <i>(JOM FISIP Vol. 4 No. 2 - Oktober 2017)</i></p>	<p>Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau dalam meningkatkan prestasi atlet atletik PPLP Dispora Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dispora Provinsi Riau dalam mendukung, memfasilitasi dan mengelola PPLP guna meningkatkan prestasi atlet atletik PPLP Dispora Provinsi, dengan merencanakan apa hendak dicapai oleh PPLP Dispora Provinsi Riau, mengkoordinasikan, mengolah informasi setiap unit pelaksana guna pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi telah berjalan dengan baik.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dalam peran Dispora hanya khusus membahas tentang bagaimana cara Meningkatkan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), sedangkan pada penelitian selanjutnya, akan dibahas mengenai peran Dispora dalam pembinaan Atlet usia dini dalam lingkup Kota.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan Peran Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan tentang bagaimana peran dispora dalam menangani atlet.</p>

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.

Berdasarkan penjabaran mengenai studi terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang mengenai penelitian masalah Pembinaan Atlet Usia Dini serta bagaimana Peran Dinas terkait, maka permasalahan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah mengenai Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini.

2.4 Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya:

1. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. **Peranan** adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. **Organisasi** sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
4. **Peranan Organisasi** adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. **Sumber daya manusia** adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

6. **Pembinaan** adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar besarnya.
7. **Atlet** adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan dalam beradu ketangkasan, kecepatan, keterampilan, dan kekuatan.
8. **Atlet Usia Dini** adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan pesat yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga dikemudian hari, sebagai langkah atau tahapan lanjutan dari pemassalan olahraga.
9. **Daerah** adalah Kota Pekanbaru.
10. **Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru** merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana memiliki peranan dalam pembinaan atlit berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Operasional Variabel

Adapun Indikator variabel dalam penelitian mengenai Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Hasil
1	2	3	4	5
<p><i>Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.</i> (Menurut Soerjono Soekanto, 2002: 243)</p>	<p>Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini</p>	<p>Rencana strategis Kebijakan</p> <p>Manajemen SDM</p> <p>Komunikasi</p>	<p>1. Perencanaan Program. 2. Tujuan yang dicapai</p> <p>1. Strategi organisasi 2. Peraturan yang Mengikat</p> <p>1. Ketersediaan pegawai 2. Kultur Organisasi</p> <p>1. Lembaga perantara antara Sekolah dan pemerintah 2. Lembaga yang mengemban misi Pembinaan Atlet dengan menjalankan program Atlet Usia Dini.</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif*, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara utuh dari sumber informasi dan data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni menganalisa mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.

Sementara Sugiyono, mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Dalam konsep *Grounded Research* bahwa

suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubungan antara teori dan pengamatan.

3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini yang terletak di jalan Kuantan I No. 4 Pekanbaru. Pemilihan topik ini didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan yang ternyata bahwa Masih rendahnya komitmen pemerintah dalam pengalokasian anggaran dana untuk pembinaan dan pelatihan Pemuda dan keolahragaan di daerah kabupaten dan kota.

Selanjutnya, Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, lokasi ini diambil karena Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan pemuda dan olahraga.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian yang diikut sertakan peneliti sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru. Adapun informan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
Informan Utama		
1	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru	1 Orang
2	Kepala Bidang Bina Pemuda	1 Orang
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1 Orang
4.	Kepala Bidang Bina Keolahragaan	1 Orang
5.	Kepala Seksi Peningkatan Prestasi	1 Orang
Informan Kunci		
6.	Atlet Usia Dini	5 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2021*

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini. Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait Pembinaan Atlet sejak Usia Dini. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).
- b. Data Sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian. Meliputi: struktur organisasi, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), profil organisasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, data Pelaksanaan perencanaan pengelolaan barang milik aset daerah dan laporan kegiatan penghapusan aset daerah (berupa laporan-laporan) dan data efektifitas kegiatan yang telah dilakukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini ini dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan secara intensif (*observation*).

Dalam melakukan *observation*, penulis berada di lokasi penelitian di Kota Pekanbaru dan mengamati secara teliti dan seksama keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian.

2. Wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*).

Dalam melakukan *in depth interview*, penulis melakukan *interview* langsung kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini dan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya atlet usia dini, Bidang Bina Keolahragaan, Bidang Sarana dan Prasarana untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam melakukan teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan seluruh data-data, laporan dan foto-foto kegiatan terkait peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.

4. Telaah kepustakaan

Dalam melakukan kegiatan studi kepustakaan, maka penulis mengumpulkan berbagai macam jenis bacaan berupa buku-buku, jurnal dan laporan terkait kegiatan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dan Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.

3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan empiris, dengan mengacu pada metode

analisis Miles dan Huberman, bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data, bahwa data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sampai kesimpulan finalnya ditarik dan diverifikasi,
2. Penyajian data, yaitu merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang meliputi berbagai gambar, jaringan kerja, kajian kegiatan, tabel dan lain-lain yang dirancang untuk merakit informasi agar mudah dimengerti dan dapat disimpulkan,
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan usaha untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi data maupun penyajian data.

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa atau diteliti dalam penelitian mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian, Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2021																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X																					
2	Seminar UP								X																				
3	Riset									X	X	X	X																
4	Penelitian Lapangan											X	X	X															
5	Pengolahan dan Analisis Data														X	X													
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis													X	X	X	X	X	X	X	X								
7	Ujian Tesis																								X				
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																									X	X		
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																											X	

Sumber: Modifikasi Penulis 2021



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum dan gambaran umum Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru serta hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini.

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

Sejarah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, secara kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan daerah nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga tingkat I Riau. Selanjutnya mengenai kewenangan, tugas dan fungsi Dispora yang menjadi dasar adalah peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang dinas pemuda dan olahraga provinsi riau sebagai dinas daerah mempunyai wewenang, tugas dan tanggungjawab membantu gubernur menyelenggarakan desentralisasi dibidang pemuda dan olahraga secara berdaya guna dan berhasil guna.

4.1.1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang Sehat, Agamis, Berbudaya Melayu, Berwawasan Kebangsaan, Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru mempunyai misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepemudaan;
2. Peningkatan Pelayanan Keolahrgaaan.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

Mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 tahun 2016 tentang rincian Tugas dan Tata Kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru terurai sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Bina Pemuda, yang membawahi 3 seksi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kreatifitas

- 2) Seksi Kelembagaan
- 3) Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda
4. Kepala Bidang Bina Keolahragaan
 - 1) Seksi Keolahragaan
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi
 - 3) Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

4.1.3 Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru selaku Kepala Dinas didukung oleh unsur sebagai mana tergambar dalam struktur organisasi diatas dan tugas masing-masing bidang dirinci sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas
- b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- c) Menyusun dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas
- d) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat
- e) Mendistribusikan tugas kepada sub bagian-sub bagian

- f) Mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas
- g) Melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- h) Membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas
- i) Membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- j) Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing
- k) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- m) Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- n) Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dalam menjalankan rincian tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
- b) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi
- c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d) Pengoorganisasian, pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan

- e) Pengoorganisasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
- f) Pengoorganisasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta kelengkapan gedung kantor
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Bina Kepemudaan

Bidang Bina Kepemudaan mempunyai rincian tugas :

- a) Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan Pemuda
- b) Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda
- c) Melaksanakan inventarisasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan organisasi pemuda
- d) Mempersiapkan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat guna pengembangan dan peningkatan tenaga teknis pembinaan pemuda khususnya dan para pemuda umumnya
- e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemuda di sekolah dan luar sekolah
- f) Melaksanakan pemberian dorongan pemassalan dan pembinaan prestasi pemuda
- g) Merencanakan pendidikan pemuda
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Kepemudaan dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan kegiatan Pemuda
- b) Pelaksanaan seleksi pertukaran pemuda
- c) Pelaksanaan inventarisasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan organisasi pemuda
- d) Penyiapan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat guna pengembangan dan peningkatan tenaga teknis pembinaan pemuda khususnya dan para pemuda umumnya
- e) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemuda di sekolah dan luar sekolah
- f) Pelaksanaan pemberian dorongan pemassalan dan pembinaan prestasi pemuda
- g) Perencanaan pendidikan pemuda
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang Kepemudaan terdiri dari yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi :

1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan kreatifitas;
2. Seksi Kelembagaan;
3. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda.

3. Bidang Bina Keolahragaan

Bidang Bina Keolahragaan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merincikan jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat yang muda diambil atau mudah digunakan
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang
- c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas

- d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya
- e. Merumuskan dan melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan pemeliharaan data kegiatan pembinaan olahraga sekolah, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan olahraga kesegaran jasmani, olahraga rekreasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyaluran dan evaluasi pemberian subsidi/bantuan untuk kegiatan olahraga sekolah, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
- h. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan olahraga sekolah, olahraga masyarakat, olahraga tradisional;
- i. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak usia sekolah, masyarakat dan penyandang cacat;
- j. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pelaksanaan olahraga tradisional;
- k. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan, analisis, evaluasi, bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
- l. Merumuskan dan melaksanakan penyampaian bahan penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan serta kegiatan pertandingan olahraga jasmani, olahraga rekreasi dan masyarakat;
- m. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Keolahragaan dalam melaksanakan rincian tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merincikan jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat yang mudah diambil atau mudah digunakan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan proesdur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang olahraga;
- e. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan dan pemeliharaan data kegiatan pembinaan olahraga sekolah, olahraga masyarakat, dan olahraga tradisional;
- f. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan olahraga kesegaran jasmani, olahraga rekreasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisoanal;
- g. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pelaksanaan olahraga tradisional;
- h. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan, analisis, evaluasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
- i. Perumusan dan pelaksanaan penyampaian bahan penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan serta kegiatan pertandingan olahraga jasmani, olahraga rekreasi dan masyarakat;
- j. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
- k. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan usaha peningkatan teknis dan keterampilan bagi pelatih olahraga di sekolah dan masyarakat;
- l. Perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pekan olahraga pelajar di sekolah;

- m. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan dan pengevaluasian data dalam rangka pembinaan dan pemberian izin/rekomendasi pertandingan olahraga bagi masyarakat;
- n. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengaturan teknis ke olahraga serta menyelenggarakan pembinaan wasit dan juri;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Keolahraagaan terdiri dari :

1. Seksi Keolahraagaan;
2. Seksi Peningkatan Prestasi;
3. Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi.

Pada Bidang Bina Olahraga ini, terdapat Seksi Peningkatan Prestasi yang bertugas melakukan pembinaan Atlet Usia Dini. Adapun Uraian tugas dari Seksi Peningkatan Prestasi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci tugas dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

- e. Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan pemeliharaan data kegiatan pembinaan olahraga sekolah, olahraga masyarakat, dan olahraga tradisional
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan olahraga sekolah, olahraga jasmani, olahraga rekreasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
- g. Melaksanakan penyaluran dan evaluasi pemberian subsidi/bantuan untuk kegiatan olahraga sekolah, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan olahraga sekolah, olahraga masyarakat, olahraga tradisional;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak usia sekolah, masyarakat dan penyandang cacat.
- j. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pelaksanaan olahraga tradisional;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana Dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana kerja;
- b) Melakukan peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- c) Melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d) Melakukan pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e) Melakukan peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- f) Melakukan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- g) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja;
- b) Pelaksanaan peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembagunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- c) Pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e) Pelaksanaan peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- f) Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

4.1.4 Sumber Daya Dinas Pemuda Dan Olahraga

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Sampai dengan saat ini jumlah pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, sebanyak 44 (empat puluh empat) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru
Menurut Tingkat Pendidikan pada Akhir Tahun 2021

NO	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah PNS (Orang)
1.	SD/Sederajat	0
2.	SMP/Sederajat	-
3.	SMA/Sederajat	6
4.	D2	-
5.	Akademi/Sarmud	2
6.	S 1	26
7.	S 2	10
	TOTAL	44

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021.

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru berpendidikan S1 sebanyak 26 orang dan 10 orang berpendidikan S2. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru
Menurut Pangkat/Golongan pada Akhir Tahun 2021

NO	GOLONGAN/ PANGKAT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Kadis
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	0	0
4.	Pembina (IV/a)	7	Kabid dan Staf
5.	Penata Tk.I (III/d)	11	Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasi dan Staf
6.	Penata (III/c)	4	Kasi dan Staf
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	10	Kasi dan Staf
8.	Penata Muda (III/a)	6	Staf
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	2	Staf
10.	Pengatur (II/c)	1	Staf
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1	Staf
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	Staf
13.	Juru Tk I (I/d)	0	0
	TOTAL	44 orang	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021.

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru pada saat ini menempati gedung kantor yang terletak di Jl. Kuantan I No. 4 Pekanbaru. Secara umum perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru belum memadai. Selain itu, dari sisi kualitas masih terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja yang memerlukan penggantian mengingat faktor umur teknis maupun perkembangan teknologi yang terjadi saat ini agar dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan kondusif.

Penunjang Operasional dilapangan diperlukan armada kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat yang memadai mengingat kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru setiap tahunnya meningkat. Secara umum aset yang terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
 Jumlah Aset Dinas Pemuda dan Olahraga pada Akhir Tahun 2021

No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Barang
1	2	3	4	5	6
1	01		Tanah (KIB A)	-	-
2	02		Peralatan dan Mesin (KIB B)	579	2.125.335.034
		02	a. Alat-alat Besar	-	-
		03	b. Alat-alat Angkutan	7 unit	646.852.105
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	1 unit	15.149.047
		05	d. Alat-alat Pertanian/Pertenakan	-	-
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	561 unit	1.360.004.196.38
		07	f. Alat-alat Kantor Studio dan Komunikasi	10 unit	103.329.685.62
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-
		09	h. Alat-alat Laboratorium	-	-
		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-
3	03		Gedung dan Bangunan (KIB C)	3	6.281.522.403.75
		11	a. Bangunan Gedung	2 unit	6.177.938.025
		12	b. Bangunan Monumen	1 unit	103.584.378.70

4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)		
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	-
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-
1	2	3	4	5	6
		15	c. Instalasi	-	-
		16	d. Jaringan	-	-
5	05		Aset Tetap Lainnya (KIB E)	71.50	1.481.001.647
		17	a. Buku Perpustakaan	43 pkt	23.250.000
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
		20	a. Aset Renovasi	28.50 unit	1.457.751.647.84
6	06		Konstruksi Dalam Pekerjaan	1	1.146.966.980
		21	Sirkuit Balap Motor	1 ls	1.146.966.980
			Jumlah.....	654.5	11.034.826.065.59

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru serta faktor apa yang menjadi kendala dalam pembinaan Atlet sejak Usia Dini, dengan menggunakan pendekatan teori peranan organisasi menurut Soerjono Soekanto (2002: 220) terdapat 4 (empat) indikator yang mempengaruhi peranan, yaitu: Rencana strategis, Kebijakan, Manajemen SDM, dan Komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

4.2.1 Identifikasi Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Bina Pemuda, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Bina Keolahragaan dan Kepala Seksi Peningkatan Prestasi yang totalnya berjumlah 5 (lima) orang. Sedangkan Informan Utama yaitu Atlet Usia Dini yang berjumlah 5 (lima) orang, sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang. Adapun karakteristik dari informan diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.4
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	8 Orang
2.	Perempuan	2 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Bina Pemuda, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang

Bina Keolahragaan dan Kepala Seksi Peningkatan Prestasi dan 3 (tiga) orang atlet usia dini sedangkan informan perempuan 2 (dua) orang yaitu atlet usia dini Kota Pekanbaru.

2. Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya. Adapun tingkat pendidikan dari keseluruhan informan, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Strata 2	1 orang
2.	Strata 1	4 orang
3.	SLTA/ SMA/ sederajat	-
4.	SLTP/ SMP/ sederajat	5 orang
5.	SD/ MI/ sederajat	- orang
TOTAL		10 Orang

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa, informan yang berlatar belakang Strata 2 berjumlah 1 (satu) orang, Strata 1 berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari seluruh pejabat struktural Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penelitian ini, selanjutnya informan yang berlatar SLTP berjumlah 5 (lima) orang semuanya adalah atlet usia dini Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Kuantan I No.5-9, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, yang merupakan tempat penelitian ini berlangsung. Sebelum melakukan wawancara tahap pertama yang peneliti lakukan adalah membuat perjanjian dengan informan, oleh karena itu tahapan wawancara ini membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari. Hal ini disebabkan oleh adanya kesibukan pekerjaan dari para pejabat struktural Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dan keinginan dari peneliti agar dapat melakukan observasi di lokasi penelitian agar dapat mendeskripsikan gambaran.

4.2.2 Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Atlet sejak Usia Dini

Peran yang dijalankan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam upaya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang olahraga, dengan upaya untuk mengembangkan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas usia pelajar melalui beberapa program Pusat Pendidikan dan Latihan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mencari serta membina atlet dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Riau. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi olahraga. Dalam hal ini Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru mencari bibit-bibit atlet yang berpotensi sehingga akan dilakukan pembinaan atlit yang dilakukan secara latihan rutin yang berguna untuk meningkatkan kebugaran atlit serta kemampuan atlit itu sendiri dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet itu untuk kedepanya.

Hasil wawancara dan penelitian mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam pembinaan Atlit usia dini jika dikaitkan dengan teori peranan organisasi menurut Soerjono Soekanto dapat diuraikan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Indikator Rencana Strategis

Dalam rancangan awal mengenai rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target. Pada rancangan awal RKPD ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi kegiatan maupun anggaran, sebagai contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Untuk mendapatkan atlet yang berpotensi maka rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru harus membuat suatu kegiatan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan melakukan pembinaan atlet dengan mencari bibit-bibit unggul berpotensi yang selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan dengan melakukan pengembangan dan pembinaan atlet yaitu dengan cara membuat sistem keolahragaan yang saling terkait dan terencana dan berkelanjutan seperti dengan memilih pelatih yang berlisensi, atlet yang terbaik dan sarana prasarana yang mendukung.

Hasil wawancara peneliti mengenai indikator rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga tentang perencanaan pembinaan atlet usia dini merupakan perencanaan dalam satu tahun, bagaimana dengan pendampingan yang dilakukan oleh pelatih pada Cabang Olahraga masing-masing. Selain itu, terkait anggaran menggunakan APBD untuk pembinaan atlet usia dini. Pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulfikri, SH, beliau menyampaikan bahwa:

*“Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru melakukan perencanaan pembinaan hanya kepada atlet dalam konteks siswa atau pelajar, sedangkan atlet dewasa dan umum itu dilakukan pembinaan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Cabang Olahraga (Cabor) masing-masing. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru memiliki wewenang membina atlet dalam kategori pelajar sebagai bibit atlet yang harus digali potensinya agar kelak menjadi atlet profesional yang dapat mengharumkan nama daerah, dalam hal terkait anggaran, tentunya tiap tahun akan kita anggaran untuk pendampingan atlet tersebut”.
(Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)*

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pekanbaru, mengenai fasilitas apa yang akan dianggarkan pada atlet usia dini untuk pembinaan kedepannya, Bapak Dedi Damhudi memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Dalam melakukan pembinaan, kami selalu membuat perencanaan guna mengatur segala bentuk pembinaan terhadap atlet di tiap-tiap cabang olahraga yang ada di Kota Pekanbaru. Tiap cabang olahraga wajib melakukan pembinaan terhadap atlet baik pemula maupun professional dengan melakukan latihan rutin dan mempersiapkan fasilitas penunjang berupa sarana alat olahraga masing-masing cabang olahraga guna memperlancar jalannya proses pembinaan kepada atlet yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu bentuk pembinaannya yakni dengan mempersiapkan sarana prasarana berupa alat dan wadah latihan para atlet usia dini yang merupakan bibit daerah. (Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru memiliki wewenang hanya melakukan pembinaan terhadap atlet yang masuk dalam kategori pelajar atau siswa yang dibina hingga menjadi atlet professional kemudian diserahkan pembinaannya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekanbaru bersama Cabang Olahraga (Cabor) masing-masing.

Perencanaan yang dilakukan berupa pelatihan rutin terjadap atlet usia dini pelatihan dilakukan di sekolah. Dalam pelatihan tersebut, para atlet dilatih kemampuan fisik seperti latihan melakukan pertandingan dan latihan skill individu, kemudian kemampuan dalam menjalankan strategi bermain seperti belajar taktik dan formasi bermain, serta pelatihan kesehatan seperti proses menjaga pola makan dan menjaga postur tubuh. Sedangkan untuk pelatihan di sekolah-sekolah para atlet dilatih oleh guru

olahraga untuk melakukan pembinaan kepada atlet pelajar. Sedangkan diluar sekolah, atlet pelajar tersebut juga mendapatkan latihan dari KONI Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pembinaan merupakan implementasi dari perencanaan pembinaan yang telah disusun dan diatur sedemikian baik guna meningkatkan kemampuan para atlet sejak usia dini hingga menjadi atlet professional. Dalam hal ini, perencanaan kebijakan dan program kegiatan dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Rencana Strategi (RENSRA) DISPORA tahun 2017-2022. Penetapan Renstra ini disusun guna sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengelola segala kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru mengatur kebijakan dan membuat program kegiatan sudah pasti memiliki alasan yang kuat. Selain olahraga yang sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat, banyak masyarakat yang menyenangi olahraga, besarnya jumlah anak usia dini yang berpotensi dalam keolahragaan juga merupakan salah satu alasan dibuatnya Program Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Selain itu kekayaan alam yang luas dan yang dipandang Dispora sebagai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi lahan yang menjanjikan bagi perkembangan wisata olahraga juga dijadikan alasan yang kuat dalam pembuatan program PPLP.

Namun rendahnya motivasi orang tua terhadap anak untuk menekuni olahraga serta masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar membuat

Dispora harus bekerja ekstra dalam menggali potensi olahraga anak usia dini dan dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Berdasarkan tabel rencana strategi Dispora dapat dilihat bahwa target atlet maupun jumlah anggaran untuk program PPLP Kota Pekanbaru disegala cabang olahraga mengalami peningkatan.

Tabel 4.6
Anggaran Program Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Atlet	Anggaran (Rp)
1	2018	67	511.987.400
2	2019	88	1.170.436.700
3	2020	97	1.593.316.950

Sumber : Dispora Kota Pekanbaru 2021.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas rencana strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa target atlet maupun jumlah anggaran untuk program PPLP di segala cabang olahraga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 target atlet yang akan dibina dalam program PPLP berjumlah 67 atlet dengan anggaran Rp. 511.987.400, Pada tahun 2019 target atlet diharapkan mencapai 88 orang atlet dengan penyediaan anggaran meningkat menjadi Rp. 1.170.436.700, ditahun 2020 target atlet 97 dengan anggaran Rp. 1.593.316.950. dan seluruh anggaran ini berdasarkan dana APBD Kota Pekanbaru.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kota Pekanbaru, Bapak Dedi Damhudi

memberikan penjelasan *tentang :*

“sarana olahraga yang ada saat ini umumnya milik masyarakat, Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk rencana ke depan Pemerintah Kota Pekanbaru harus menyediakan, membangun dan mengembangkan sarana olahraga di setiap Kecamatan. (Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB). Adapun jumlah sarana yang ada pada saat ini ada dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Olahraga Kota Pekanbaru
Provinsi Riau

NO	CABANG OLAHRAGA	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAPANGAN SEPAK BOLA	6	6	52	52	52	52
2	LAPANGAN VOLLEY BALL	1	1	75	75	75	75
3	LAPANGAN SEPAK TAKRAW	-	-	3	3	3	3
4	LAPANGAN BULU TANGKIS	1	1	78	78	78	78
5	LAPANGAN TENIS	1	1	11	11	11	11
6	LAPANGAN ATLETIK	-	-	-	-	-	-
7	KOLAM RENANG	1	1	22	22	22	22
8	LAPANGAN BASKET	-	-	15	15	15	15
9	LAPANGAN FUTSAL	-	-	31	31	31	31
10	SASANA TINJU	-	-	5	5	5	5
11	FITNESS	-	-	20	20	20	20
12	BILLIARD	-	-	15	15	15	15
13	PANJAT TEBING	-	-	3	3	3	3
14	ANGGAR	-	-	1	1	1	1

15	BOWLING	-	-	1	1	1	1
16	GOLF	-	-	2	2	2	2
17	MENEMBAK	-	-	1	1	1	1
18	WUSHU	-	-	2	2	2	2
19	DAYUNG	-	-	1	1	1	1
20	SQUASH	-	-	2	2	2	2
21	SKI AIR	-	-	1	1	1	1

Sumber : Dispora Kota Pekanbaru, 2020.

Berbicara mengenai tujuan yang akan dicapai peran yang dijalankan Dinas Pemuda dan Olahraga kota Pekanbaru dalam upaya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang olahraga dengan mengembangkan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas usia pelajar melalui program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) salah satunya pembibitan dan pembinaan olahraga cabang atletik.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulfikri, SH, menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru perlu melakukan perencanaan pembinaan atlet pelajar kedepan untuk membangun tujuan dari pembinaan itu sendiri. Perencanaan pembinaan kedepan setelah atlet mengikuti kompetisi/event dan atlet terbaik tersebut harus di beri fasilitas serta penghargaan agar mereka bisa terus berprestasi, hal ini di rasa perlu dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, hal ini yang akan menjadi tujuan pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya, selain itu kita juga ingin kedepannya atlet-atlet berprestasi ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya”.
 (Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Bina Keolahragaan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adri Hidayat Putra S.STP, beliau menjelaskan:

“Hal terpenting adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru harus membuat program perencanaan dan pembinaan kedepan untuk membangun tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan pembinaan kedepan jelas atlet tersebut mendapat arah yang jelas terhadap karirnya kedepan seperti apa, bahkan mereka tetap bisa menjaga konsistensinya untuk terus berprestasi kedepannya.”. (Wawancara tanggal 10 Juni 2021, pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan prestasi yang maksimal tentu perlu menciptakan rencana pengembangan serta tujuan yang ingin dicapai terhadap atlet yang berpotensi yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan kepada atlet tersebut. Maka untuk menciptakan rencana pengembangan perlu mencari bibit-bibit yang berpotensi yang selanjutnya akan di lakukan pembinaan dan akan diseleksi untuk mengikuti kompetisi/event.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa, faktanya saat ini perencanaan pembinaan kedepan terhadap atlet itu belum dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru. Atlet yang telah mengikuti event tersebut seterusnya di kembalikan ke sekolah masing-masing, tidak ada pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru untuk tetap mempertahankan prestasi atlet tersebut kedepannya. Atlet-atlet pelajar atau usia dini tersebut hanya akan berlatih sendiri agar tetap menjaga kondisinya. Hal ini dinilai kurang maksimal dimana dengan hanya melakukan melakukan latihan sendiri sangat berbeda hasilnya ketika latihan itu dengan pengawasan dari pelatih dengan program-program serta waktu dan fasilitas yang di dapat ketika pembinaan itu dilakukan secara tersusun, terprogram dan terencana.

Berkaitan dengan perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru serta mengacu pada teori yang dikemukakan Soekarno (dalam Torang, 2014:167), bahwa perencanaan adalah persiapan, acuan, garis-garis besar pedoman kerja, atau persiapan tertentu untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, maka peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru sesuai tugas untuk pembibitan dan pembinaan atlet yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 tahun 2016, mengenai pembibitan dan pembinaan atlet pelajar (PPLP), dalam proses perencanaan yang meliputi :

- a. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlit pelajar dan pelatih olahraga atletik untuk mengikuti pendidikan dan Latihan Olahraga (PPLP).
- b. Melakukan indentifikasi data Atlit pelajar yang potensial dan berprestasi.
- c. Menyusun tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).

2. Indikator Kebijakan

Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu faktor pendukung maksimalnya usaha dalam peningkatan prestasi atlet, namun beberapa poin yang terkandung di dalam kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru mempunyai kebijakan tentang strategi yang dilakukan dalam pembinaan atlet usia dini atau pelajar, pembinaan dalam suatu cabang olahraga dimulai dari usia sedini mungkin agar tubuh atlet dapat melakukan adaptasi dan dikembangkan secara progresif serta sistematis. Pembinaan dapat diawali dengan merancang suatu program dan manajemen yang matang.

Hasil wawancara peneliti dengan para Atlet Usia Dini atau pelajar mengenai bagaimana pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru selama menjadi atlet. Menurut Bima Akbar yang merupakan Atlet Silat yang berasal dari SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru, mengatakan :

“Awal dari pembinaan yang saya dapat dari mengikuti ekstrakurikuler di sekola, kemudian saya dibina di Sekolah, setelah itu baru direkomendasikan ke Dinas untuk dapat dimasukkan kedalam pembibitan dan pembinaan atlet pelajar, tentunya dengan seleksi terlebih dahulu”. (Wawancara tanggal 11 Juni 2021, pukul 12.00 WIB)

Selanjutnya menurut Atlet Silat Kota Pekanbaru Putri Seruni yang bersekolah di SMP Negeri 13 Kota Pekanbaru ia memberi sedikit penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah yang ia dapatkan selama menjadi atlet, adalah sebagai berikut:

“Bakat saya mengikuti olahraga Silat ini sudah saya ikuti dari SD dengan mengikuti keinginan orang tua saya, waktu SD juga sudah sering mengikuti lomba, sampai akhirnya di SMP ini saya dimasukkan untuk mengikuti cabang olahraga Silat didalam pusat pembinaan naungan Dinas, hal yang saya dapat mungkin kedepannya bisa masuk jalur khusus untuk memilih SMA favorit”. (Wawancara tanggal 11 Juni 2021, pukul 12.00 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bintang Mahesa Mulia Atlet Renang yang bersekolah di SMP Negeri 10 Pekanbaru, ia mengatakan:

*“Harapan saya dipilih dan ditunjuk sebagai atlet ini kedepannya bisa membawa nama Kota Pekanbaru dalam Kejuaraan Nasional dan tentunya ingin pemerintah memperhatikan pendidikan kami kedepannya”.
(Wawancara tanggal 11 Juni 2021, pukul 12.00 WIB)*

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan informan utama tersebut diatas yaitu atlet usia dini atau usia pelajar, bahwa para atlet usia dini tersebut sangat mengharapkan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperhatikan pendidikan mereka kedepannya, pembinaan yang mereka dapatkan disetiap cabang olahraga sudah mereka peroleh di Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Akan tetapi kenyataan dilapangan bahwa pencarian bibit-bibit tersebut hanya dilakukan pada saat akan dilaksanakannya event, jadi apabila event tersebut tidak ada di selenggarakan maka secara otomatis tidak ada proses pencarian bibit-bibit berpotensi yang selanjutnya untuk menciptakan rencana pengembangan dan pembinaan.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Atlet di Kota Pekanbaru harus sering dilakukan, masing-masing point kegiatan mengalami evaluasi dan perlu ada perbaikan. Oleh sebab itu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, bapak Thausyan Lutfi memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap atlet guna mencocokkan apakah pembinaan yang dilakukan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu juga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru selalu rutin mengevaluasi anggaran pembinaan di Dinas sehingga kedepan dapat diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan dalam

melakukan pembinaan atlet”. (Wawancara tanggal 10 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru rutin melakukan evaluasi baik dalam pelaksanaan pembinaan maupun anggaran pembinaan.

Bentuk strategi yang digunakan oleh Dispora Kota Pekanbaru dalam hal ini dengan memberikan fasilitas latihan supaya memudahkan untuk atlet itu bertanding, mendatangkan pelatih yang berkomptensi agar bisa melatih atlet tersebut dengan kompetensi dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga di harapkan mampu mencetak atlet yang berkomptensi juga dan bonus uang prestasi yang sedikit sangat mempengaruhi semangat atlet tersebut dalam melakukan latihan atau dalam dilakukan pembinaan. Hal ini tentu dirasa masih kurang untuk benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal.

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Bidang Bina Keolahragaan mengenai adanya bonus yang diberikan atas prestasi yang akan diraih oleh atlet usia dini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adri Hidayat Putra S.STP, beliau menjelaskan:

“Untuk membuat atlet usia dini atau pelajar bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti proses di dalam pembinaan tersebut, tentu harus memberikan bonus atas prestasi yang mereka raih, sehingga atlet tersebut bisa mencapai hasil yang maksimal untuk setiap mengikuti event keolahragaan, hal yang kita lakukan saat ini untuk atlet berprestasi adalah memberi kemudahan dan kouta untuk dapat masuk ke SMA favorit dengan

menggunakan jalur siswa berprestasi”. (Wawancara tanggal 10 Juni 2021, pukul 12.00 WIB)

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas, bahwa untuk lebih meningkatkan prestasi atlet, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru perlu memberikan bonus atas prestasi yang mereka raih dan memberi kemudahan terhadap pendidikan lebih lanjut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru perlu lebih menekankan standar pembinaan atlet untuk mengukur progres (kemajuan) dan prestasi yang akan didapat nantinya. Dengan lebih meningkatkan standar pembinaan di harapkan atlet tersebut bisa meningkatkan kemampuannya sehingga akan mencapai keunggulan. Serta dengan adanya target yang harus di capai oleh atlet tersebut diharapkan mampu bekerja keras untuk bisa memacu atlet itu mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal yang perlu ditegaskan juga untuk pembinaan dan kesejahteraan atlet Pemerintah Kota Pekanbaru harus membuat suatu peraturan yang mengikat, agar mereka memiliki payung hukum yang kuat selama menjadi atlet yang memiliki prestasi dikancah nasional maupun internasional.

Hasil wawancara peneliti mengenai adanya aturan yang mengikat untuk para atlet, pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulfikri, SH, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 10 Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang menyebutkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional, untuk Pemerintah Kota

Pekanbaru sendiri sejauh ini belum ada mengeluarkan Peraturan Daerah, hanya saja masih sebatas SK (Surat Keputusan) Walikota”. (Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Dari hasil penelitian peran Dispora dalam perencanaan dalam rangka tujuan program Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar sebagai pusat pembinaan dan latihan pelajar, memang belum adanya payung hukum yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru secara spesifik kepada atlet usia dini, tujuan persiapan dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti pertandingan nasional (PON), persiapan pada PPLP tersebut, antara lain, meliputi :

1. Pembentukan tim seleksi dan pelaksanaan seleksi atlet yang akan dimasukkan kedalam pemusatan latihan.
2. Pelaksanaan pemusatan latihan atlet.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemusatan latihan atlet.
4. Melakukan *try out* keluar daerah untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet.

Seperti yang tercantum pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan.

- b. Peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan.
- c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan, dan
- d. Peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

Peran pemerintah dalam menerapkan kecintaan terhadap olahraga sejak dini, utamanya atletik sebagai “ibu” dari sebagian besar cabang *olahraga (mother of sport)*, gerakan-gerakan yang ada dalam atletik seperti: jalan, lari, lompat dan lempar dimiliki oleh sebagian besar cabang olahraga. Hal ini sesuai dengan SK. Mendikbud No. 0413/U/87 yaitu pemerintah mengkategorikan cabang olahraga atletik sebagai salah satu mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) yang wajib diberikan kepada para siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah lanjutan menengah atas.

Upaya pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk mengembangkan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan kearah pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kota Pekanbaru sebagai sebuah wadah yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat.

Untuk mengembangkan potensi olahraga tersebut, melalui program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang dibina oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga (Dispora) Kota Pekanbaru melakukan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (usia dini) terhadap 15 (lima belas) cabang olahraga dengan pemusatan latihan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3. Indikator Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam meningkatkan pencapaian prestasi atlet di Kota Pekanbaru diperlukan suatu program pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru salah satunya Sumberdaya Manusia Olahraga (pelatih, atlet, wasit, dan pengurus olahraga).

Perlunya manajemen SDM dalam pembinaan atlet berprestasi, dimana setelah mendapatkan bibit yang berpotensi selanjutnya akan dilakukan pembinaan prestasi dimana bibit tersebut akan diberi program-program latihan yang ditetapkan sehingga akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pembinaan serta meningkatkan kualitas latihan, di harapkan mampu membuat atlet tersebut terus berprestasi kedepannya. Dalam melakukan pembinaan prestasi dapat dilakukan dengan indikator manajemen Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan atlet, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru perlu menyediakan sumber daya yang diperlukan saat proses pembinaan.

Peneliti memberi pertanyaan mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini yaitu Sumberdaya Manusia Olahraga (pelatih, atlet, wasit, dan

pengurus olahraga) di Kota Pekanbaru, apakah sudah mencukupi untuk melakukan pembinaan terhadap para atlet pelajar. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulfikri, SH, ia menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini memang kita kekurangan sumber daya manusia, seperti pelatih yang kita butuhkan tentunya harus sesuai dengan perbandingan jumlah atlet yang akan kita bina, daftar jumlah pelatih yang ada di Dispora Kota Pekanbaru ada 30 pelatih untuk 15 Cabang olahraga, kalau untuk wasit dan pengurus olahraga kami rasa cukup, sedangkan untuk atletnya sendiri kita terus berupaya menambah jumlah atlet dan mencari bibit-bibit atlet ke setiap sekolah yang ada di Kota Pekanbaru”. (Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa, pelajar sebagai sumber daya manusia yang tepat untuk menjadi sasaran dalam menciptakan cikal bakal munculnya atlet berprestasi sebagai atlet di masa mendatang. Hal ini didasari pada kuantitas jumlah pelajar di Kota Pekanbaru yang cukup besar sehingga memiliki peluang yang sangat besar munculnya atlet-atlet potensial apabila dilakukan pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini

dikembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu diberi imbalan penghargaan dan promosi.

Adanya Mekanisme manajemen pengelolaan SDM pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar dijelaskan sebagai berikut:

1. Seleksi dan Kualifikasi

Pada proses seleksi dan kualifikasi pelajar dan pelatih PPLP ini, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan melibatkan Dinas Pendidikan, Pengurus Daerah Cabang Olahraga dan KONI Provinsi. Hasil seleksi diumumkan melalui panggilan yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan / Dinas Pemuda Olahraga / pengurus cabang olahraga bersangkutan. Keputusan diterimanya pelatih maupun pelajar ditandai dengan surat keputusan dari Dinas yang menangani PPLP.

2. Proses Penyelenggaraan

Setiap pengelola PPLP mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan baik secara teknis maupun non teknis. Adapun aktivitas dan prosedur pembinaan PPLP adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Latihan, pelatih diwajibkan menyusun program latihan tahunan dan dijabarkan pada program latihan mingguan dan harian. Program latihan tahunan disusun berdasarkan kalender kompetisi yang ada di induk organisasi cabang olahraga masing-masing. Disarankan untuk puncak prestasi setiap tahun ditempatkan pada Kejuaraan Nasional Nasional antar PPLP. Sedangkan kejuaraan yang lain ditempatkan sebagai sasaran antara latihan atau

try-out. Dari jadwal kejuaraan yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga beserta instansi terkait lainnya, pelatih dapat menyusun program latihan dengan periodisasi yang ada.

- b. Tes dan Monitoring, tes sebagai kontrol kemajuan latihan dan kondisi kesehatan pelajar harus dilaksanakan secara periodik. Tes kontrol latihan yang meliputi tes fisik dan teknik dilaksanakan sesuai dengan pelatih cabang olahraga masing-masing dengan konsultasi Pengurus PPLP lainnya. Sedangkan tes kesehatan dilakukan bersama dengan pelaksanaan urusan kesehatan untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan pelajar. Selama monitoring, petugas monitoring akan menanyakan berbagai kegiatan teknis seperti, pengecekan program dan pelaksanaan latihan, catatan hasil latihan dan sebagainya.
 - c. Kompetisi dan try-out, setiap PPLP wajib untuk mengikuti kompetisi minimal dua kali pertahun. Satu kompetisi yang bersifat latihan (try-out) dan satu kompetisi yang merupakan puncak prestasi sebagai sarana evaluasi perkembangan prestasi pada tahun tersebut.
3. Promosi /Degradasi

Hasil evaluasi akan menentukan apakah berbagai faktor kegiatan dalam PPLP dapat dapat diteruskan atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi atau harus dilakukan sebuah peringatan dan koreksi atau bahkan terjadi degradasi pada unsur-unsur PPLP. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi : pengelola, pelatih, pelajar, dan situasi fisik PPLP seperti asrama dan sarana prasarana latihan.

a. Pelajar

Promosi ditandai dengan diberikannya rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut di jenjang yang lebih tinggi yaitu PPLM / Perguruan Tinggi atau di Pengurus Provinsi Cabang Olahraga yang bersangkutan. Degradasi ditandai dengan pemulangan / dikeluarkan pelajar bila hasil evaluasi menunjukkan:

- 1) Pelajar telah menyelesaikan studinya di sekolah menengah sehingga harus keluar dari PPLP secara otomatis.
- 2) Pelajar pada periode tertentu tidak menunjukkan perkembangan prestasi, atau terjadi penurunan prestasi.
- 3) Pelajar tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
- 4) Pelajar tidak dapat mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh pengelola PPL (indisipliner).

b. Pelatih

Pelatih dapat direkomendasikan untuk layak dipertahankan bila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya prestasi atlet. Pelatih dapat direkomendasikan untuk diberhentikan bila hasil evaluasi menunjukkan :

- 1) Tidak mampu menjalankan tugasnya secara konsisten.
- 2) Tidak mampu meningkatkan prestasi atlet yang ditangani dalam kurun waktu tertentu.

- 3) Tidak dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola PPLP (indisipliner).
- 4) Setelah tahap promosi/ degradasi, PPLP secara siklus kembali ke langkah awal yaitu : menyelenggarakan tes dan seleksi masuk bagi anggota baru (pelajar atau pelatih) bila memang terjadi kekosongan tempat dalam proses promosi-degradasi.

c. Pengelolaan PPLP

Pengelolaan cabang olahraga dalam PPLP, dapat direkomendasikan untuk dilanjutkan atau diganti dengan cabang olahraga yang lain melalui proses evaluasi. Cabang olahraga dapat dilanjutkan bila menunjukkan perkembangan prestasi. Cabang olahraga dapat direkomendasikan untuk diganti bila tidak menunjukkan perkembangan prestasi.

Selanjutnya berbicara mengenai kultur organisasi dalam suatu manajemen SDM perlu adanya pembinaan jangka panjang yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, yaitu dengan membuat rencana kedepan secara tersusun, terprogram, dan berkelanjutan. Sehingga atlet-atlet usia dini tetap bisa menjaga konsistensinya dalam berlatih maupun bertanding. Dengan demikian atlet tersebut bisa tetap berprestasi dalam setiap kompetisi /event yang mereka ikuti kedepannya. Bahkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru sudah mempunyai atlet yang siap tanding apabila ingin mengirimkan atletnya untuk bertanding pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sehingga dapat mengharumkan nama

daerah di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. Dari segi masa depan seperti pekerjaan, seharusnya ada masa depan yang harus di dapat ketika atlet tersebut berprestasi dan mengharumkan nama daerah, itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada atlet tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, peneliti memebrikan pertanyaan mengenai apakah ada pengawasan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan evaluasi atlet usia dini baik di Sekolah maupun yang ada di Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Kepemudaan, Bapak Zul Edi S.ST, beliau menjelaskan:

“evaluasi dan pengawasan tentu kami lakukan, pentingnya pengawasan oleh pemerintah kepada program PPLP karena menilai pentingnya program ini demi kelangsungan atlet dimasa depan sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah melalui kami Dinas Pemuda dan Olahraga serta diikutsertakan KONI, dan instansi lain yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan PPLP.”. (Wawancara tanggal 10 Juni 2021, pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa pentingnya pengawasan oleh pemerintah kepada program PPLP karena menilai pentingnya program ini demi kelangsungan atlet dimasa depan. Sementara itu dapat dilihat bahwa kekurangan petugas lapangan akan mempengaruhi kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan kontrol terhadap perkembangan atlet. Hal ini juga dapat menjadi penyebab menurunnya prestasi atlet yang disebabkan

kurangnya pengawasan dalam perkembangan atlet, tidak adanya bentuk pengawasan dalam kedisiplinan atlet.

Hal ini berkaitan dengan teori menurut Malcolm dan Provus dalam Suharsimi (2007:4) evaluasi ataupun pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui perbedaan antara yang ada dengan suatu standar yang telah ditetapkan serta bagaimana menyatakan perbedaan antara keduanya. Ralph Tyler dalam Suharsimi (2007:1), evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan program sudah tercapai. Sedangkan Menurut Stoner (2002:20) “Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Atlet di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, namun secara keseluruhan, masing-masing point kegiatan mengalami evaluasi dan perlu ada perbaikan.

4. Indikator Komunikasi

Indikator komunikasi menjadi alur utama bagi pelaksanaan setiap kebijakan ketika akan diterapkan. Hal ini terkait dengan pertanyaan bagaimana menyampaikan sebuah kebijakan yang hendak dijalankan baik kepada para target kebijakan, kemudian bagaimana mengetahui respon para pelaksana dari kebijakan itu. Untuk menyampaikan keputusan kebijakan yang diambil tersebut diperlukan adanya komunikasi kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sikap, mengubah opini atau

pendapat, mengubah perilaku serta menciptakan pengertian bersama karena komunikasi merupakan interaksi antara komunikator dengan komunikasi yang mempertukarkan dan memberi makna yang sama atas informasi untuk satu tujuan tertentu melalui media, teknik atau cara yang telah ditetapkan.

Komunikasi diperlukan dalam membuat rencana strategi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang bagaimana mengenalkan prestasi kepada atlet tersebut, dimana prestasi tidak bisa didapat dengan segera tetapi perlu proses dan kerja keras dari atlet itu sendiri. Dalam melakukan pembinaan, pengenalan prestasi dilakukan dengan cara membuat atlet tersebut tetap percaya diri pada kemampuannya dalam mengikuti event sehingga akan mendapatkan prestasi yang terbaik. Saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru melakukan strategi pembinaan salah satunya dengan memberikan suntikan motivasi kepada atlet agar atlet tersebut dapat percaya diri terhadap kemampuannya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap penampilannya pada saat akan mengikuti event, rasa takut akan hasil yang tidak maksimal yang timbul saat akan bertanding akan berkurang bahkan hilang pada saat atlet itu merasa percaya diri pada kemamuan yang dia punya.

Mengenai Pertanyaan tentang penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, dalam pelaksanaan mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga beserta Sekolah, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan juga KONI sebagai pembina pada program PPLP memiliki tugas memberikan arahan dan bimbingan demi kelancaran serta kesuksesan pembinaan. Namun berbeda

dengan Sekolah, KONI dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam proses pembinaan, seperti halnya KONI sebagai pelaksana kegiatan yang berurusan dengan penyelenggaraan kegiatan pertandingan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulfikri, SH, beliau mengatakan bahwa:

“Dari Tupoksi yang sudah diberikan oleh Walikota Pekanbaru mengenai uraian tugas Dispora, Kepala dan Bidang Bina Keolahragaan olahraga beserta Seksi Peningkatan Prestasi memiliki tugas menyusun rencana program kerja tahunan, kami telah melakukan beberapa pembinaan terhadap para atlet yang berstatus pelajar dengan melakukan pelatihan-pelatihan rutin di sekolah masing-masing melalui guru olahraga dan khusus di cabang olahraga yang dia geluti. Selain itu, kita juga tiap tahun selalu melaksanakan kegiatan turnamen tingkat Kota guna mengasah terus kemampuan para atlet pelajar di Kota Pekanbaru seperti melaksanakan turnamen Liga Pelajar Indonesia (LPI) untuk kategori olahraga sepak bola, Turnamen Catur antar pelajar, turnamen silat, kerate dan bela diri.”(Wawancara tanggal 09 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, bapak Thausyan Lutfi memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dispora Kota Pekanbaru tentu harus selalu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti sekolah, pengurus PPLP, KONI Kota maupun ke tingkat Provinsi, kalau dalam pelaksanaan pembinaan, KONI Kota Pekanbaru telah banyak melakukan pembinaan sehingga prestasi para atlet baik tingkat professional maupun pelajar sangat diperhitungkan oleh daerah lain, seperti yang baru saja dicapai pada Tahun 2020 lalu meraih juara pertama Silat yang diraih oleh pelajar SMP 13. Selain itu, untuk membina para atlet juga KONI telah siapkan wadah seperti Lapangan, Dome, dan Gedung untuk latihan para atlet”. (Wawancara tanggal 10 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru aktif melakukan pembinaan baik dalam segi pelatihan

maupun gelaran turnamen serta berkolaborasi dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti sekolah, pengurus PPLP, KONI Kota maupun ke tingkat Provinsi, kalau dalam pelaksanaan pembinaan Olahraga.

Menurut Handoko (2003:195) mengemukakan bahwa koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (Jabatan atau bidangbidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu pada setiap jabatan akan kehilangan pegangan atas peranan tugas mereka dalam menjalankan fungsi organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun Program Pembinaan Olahraga Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru melaksanakan program yang terdiri dari :

- a. Program peningkatan pembinaan atlet, pelatih, dan wasit.
- b. Program pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi.
- c. Program pembinaan dan pengembangan olahraga dikalangan pelajar dan mahasiswa.
- d. Program pembinaan keolahragaan di Sekolah (SD, SLTP, SLTA).
- e. Program peningkatan pembinaan kesegaran jasmani dan rohani.

Dari hasil penelitian peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, koordiansi yang dilakukan berkaitan dengan tugas yang diberikan meliputi;

1. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembibitan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar dengan pihak terkait.

2. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembibitan, seleksi atlet, peningkatan prestasi olahraga pelajar.

Pembinaan keolahragaan oleh pemerintah tentu tidak hanya ditujukan pada olahraga prestasi yang pencapaiannya tercermin dalam perolehan medali emas pada pekan olahraga. Kewajiban pemerintah juga diarahkan pada pembinaan olahraga pendidikan dan rekreasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, jelaslah bahwa tugas pembinaan atlet keolahragaan oleh pemerintah tidak hanya tertuju pada peningkatan prestasi sebagaimana tercermin dalam perolehan medali pada pekan olahraga yang berjenjang. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa pencapaian prestasi merupakan satu indikator puncak kemajuan dunia olahraga dalam suatu daerah.

4.2.3 Faktor kendala yang mempengaruhi Pembinaan Atlet sejak usia dini pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

Dalam melakukan pelaksanaan program pembinaan atlet usia dini atau pelajar melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru terdapat beberapa faktor yang menghambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Dinas Pemuda dan Olahraga, mengingat pentingnya memaksimalkan potensi calon calon atlet masa depan memiliki kemampuan yang baik dan juga penting untuk memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan potensi atlet. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kota Pekanbaru yang dihadapi dalam pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Dilihat dari Indikator Rencana strategis

Untuk mendapatkan bibit atlet usia dini yang maksimal tentu perlu membuat dan menetapkan rencana strategis dalam pengembangan terhadap atlet yang berpotensi tersebut yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan kepada atlet tersebut. Hal yang terjadi saat ini pencarian bibit-bibit tersebut hanya dilakukan pada saat dilaksanakannya event, jadi apabila event tersebut tidak ada di selenggarakan maka secara otomatis tidak ada proses pencarian bibit-bibit berpotensi. Adapun yang menjadi kendala dalam indikator rencana strategis yaitu:

- a. Pelaksanaan program yang belum optimal karena keterbatasan dana, terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah terhadap pendanaan olahraga. Terbatasnya dana untuk pengelolaan mengakibatkan kurang efektifnya pembinaan, terbatasnya dana juga menyebabkan tidak maksimalnya penyediaan tempat latihan bagi para atlet. Untuk meningkatkan pembinaan terhadap Atlet, maka dibutuhkan tempat latihan seluruh cabang olahraga yang cukup memadai dilingkungan asrama agar pembinaan dan kegiatan seluruh Atlet dapat terpantau secara efektif.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan seperti peralatan demo untuk Pemuda dan olahraga, asrama dan gedung untuk atlet, kendaraan, ruang rapat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru sebagai

pendukung dan fasilitator membina para atlet pelajar melalui bantuan alat-alat olahraga, tenaga pelatih atau guru olahraga dan uang insentif kepada pelatih dan atlet. Selain itu, dalam rangka meningkatkan prestasi para atlet olahraga, PPLP sebagai tempat pembinaan dan latihan olahraga pelajar memerlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Hal ini penting mengingat sarana dan prasarana olahraga sangat dibutuhkan sebagai penunjang keberhasilan atlet tersebut dalam mencapai prestasi.

2. Dilihat dari Indikator Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa pembinaan program Pusat Pengembangan dan Latihan olahraga pelajar memiliki kendala yang terjadi antara hubungan dari lembaga lembaga yang bersangkutan seperti KONI, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga ataupun dinas terkait lainnya tidak terjalin dengan baik dikarenakan kebijakan yang tidak sesuai dengan masing-masing lembaga sehingga tidak berjalan dengan maksimal pelaksanaan program ini. Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu menciptakan keserasian kebijakan antara setiap *stackholder* program ini serta dapat menjaga hubungan antar lembaga agar berjalan dengan maksimalnya Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar ini. Faktor kendala pada indikator kebijakan ini terlihat dari:

- a. Belum Terstrukturnya Sistem Pembinaan dan Penjaringan Atlet, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam menjalankan sistem penjaringan

dan pembinaan belum terstruktur dari daerah, atau minimnya peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam mengidentifikasi bibit-bibit yang ada sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota Pekanbaru. Selain itu, sistem pembinaan terfokus pada koordinasi pelaksanaan kegiatan pembibitan dilakukan bersama pelatih atlet dalam menilai atlet yang akan dibina pada PPLP dalam mempersiapkan atlet dalam kompetisi antar pelajar.

- b. Kurang terpadunya sistem manajemen pengelolaan serta kurang terpadu dan selarasnya kebijakan pembinaan olahraga merupakan penyebab lemahnya koordinasi dan kerjasama antarorganisasi atau lembaga yang juga terlibat didalam program pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.

3. Dilihat dari Indikator Manajemen SDM

Sulitnya memperoleh/ menjaring atlet profesional sejak usia dini sebagai akibat dari lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjaringan yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda. Kendala yang dihadapi pada indikator manajemen SDM yaitu rendahnya kemampuan pelatih olahraga prestasi untuk melakukan pembinaan olahraga di Kota Pekanbaru, tidak ada Pegawai Fungsional tertentu seperti wasit dan pelatih untuk seluruh cabang olahraga dan masih rendahnya kualitas manajemen organisasi Pemuda yang ditandai dengan belum terencananya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemuda.

4. Dilihat dari Indikator Komunikasi

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan sasaran untuk mempersiapkan atlet dalam meningkatkan prestasi atlet. Dalam mengelola informasi pada setiap sekolah maupun PPLP dan Koni Kota Pekanbaru, dalam mengambil keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru mengidentifikasi setiap masukan/ laporan dari sekolah/ pelatih atletik. Namun, peran pengurus cabang atletik ditingkat belum yang optimal dalam memberikan alternatif atau rekomendasi atlet-atlet yang memiliki bakat untuk diseleksi dan di bina pada PPLP Dispora Kota Pekanbaru. Jika dilihat dari indikator komunikasi kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Rendahnya Koordinasi dan Peran Pengurus terkait;
- b. Komunikasi dan koordinasi antar bidang belum berjalan dengan baik, akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal.

BAB V PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap hasil penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan peranan Dinas Pemuda

dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pembinaan Atlet Sejak Usia Dini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam pembinaan Atlet Sejak Usia Dini cukup berperan, hal tersebut terlihat dari perencanaan yang telah disusun yakni adanya Latihan rutin pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di tiap Cabang Olahraga, Pendampingan pada tiap turnamen dan melengkapi fasilitas olahraga di tiap Cabang Olahraga, selain itu peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam mendukung, memfasilitasi dan mengelola Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar guna meningkatkan prestasi atlet, Namun, peran Dispora dalam mengkoordinasikan keseluruhan sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru, klub atletik, guna mengidentifikasi atlet daerah untuk menemukan bibit baru dari bakat yang telah dimiliki masih sangat minim, atlet yang terpilih sebagian besar berasal dari pusat seleksi dan pembinaan atlet terfokus pada pelajar di sekolah yang ternama di kota Pekanbaru.
2. Adapun kendala-kendala atau faktor yang menghambat peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru dalam pembinaan Atlet Sejak Usia Dini, antara lain, terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah terhadap pendanaan olahraga dan sistem pembinaan belum terarah, minimnya Sarana dan Prasarana, seperti fasilitas kesehatan dan alat penunjang latihan fisik, dan rendahnya peran pengurus terkait. Kurang terpadunya sistem manajemen

pengelolaan serta kurang terpadu dan selarasnya kebijakan pembinaan olahraga merupakan penyebab lemahnya koordinasi dan kerjasama antarorganisasi atau lembaga yang juga terlibat didalam program pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.

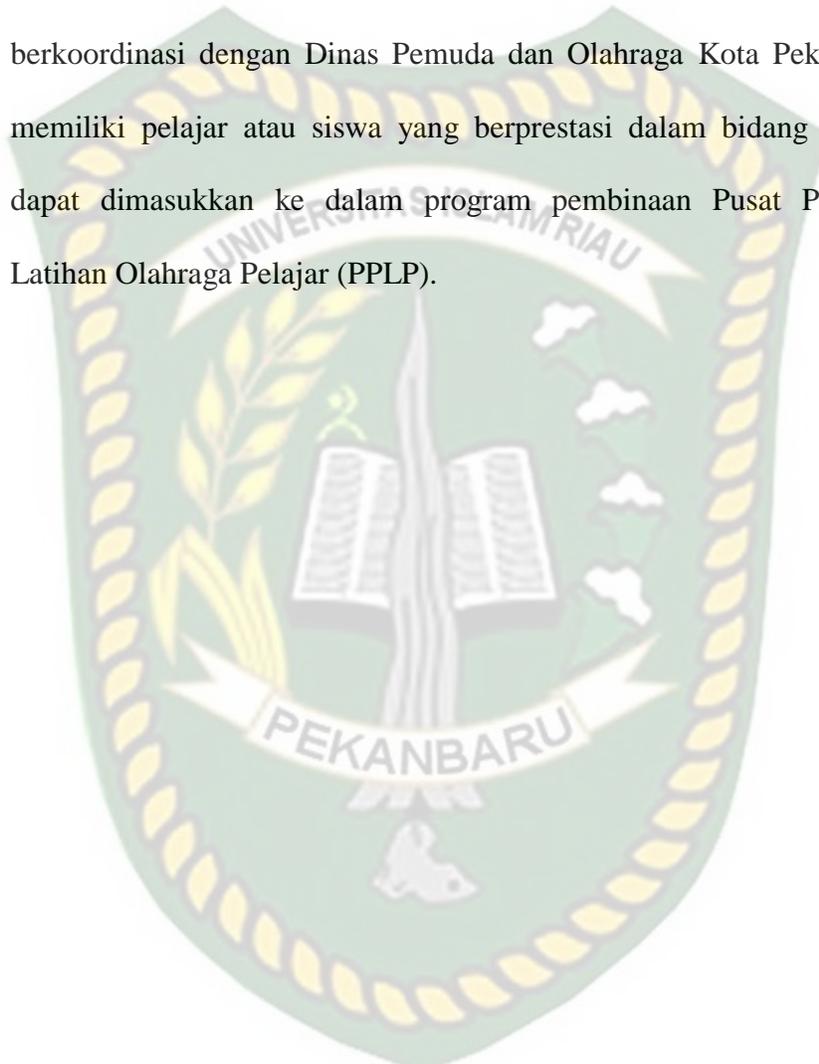
6.2 Saran

Berdasarkan analisis hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pembinaan Atlet Sejak Usia Dini, yaitu:

1. Perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi, dasar hukum dan kebijakan yang bisa menciptakan interkoneksi dan keterpaduan dengan seluruh lembaga bersangkutan. Dengan terciptanya kerjasama antar lembaga maka semakin ringan dalam pelaksanaan programnya.
2. Terhadap instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru diharapkan dapat lebih memperhatikan perencanaan dan anggaran pembinaan atlet di Kota Pekanbaru agar dapat melengkapi peralatan olahraga yang masih kurang sehingga proses pembinaan terhadap atlet, khususnya pada atlet usia dini dapat maksimal dan dapat menganggarkan tiap tahunnya untuk peningkatan kapasitas kemampuan atlet usia dini di sekolah-sekolah melalui program

bidang pemuda dan Olahraga yang berada dibawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.

3. Khusus sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, untuk dapat selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru apabila memiliki pelajar atau siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga, agar dapat dimasukkan ke dalam program pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

- Aisyah Siti. Dkk, 2010. *Perkembangan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ambarukmi, D. A. dkk. 2007. *Pelatihan Pelatih Fisik Level I*. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga. Kemenpora
- Bagong – Dwi Narwoko, J. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Media Group
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Hadari Nawawi, 2003; *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cetakan ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hibana Rahman. 2002. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : PGTKI Press
- Husdarta. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan*. Bandung : Alfabeta.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Legino, S. 2009. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Jakarta: Indonesia Press.
- Maleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, dan Fadillah. P, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung.
- Munaf, Yusri. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru.

- Mutiara S. Panggabean. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Furqon H & Muchsin Doewes. 2002. *Pliometrik untuk Meningkatkan Power*. Surakarta: Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Pasca Sarjana UNS.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 2. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Rian D. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. Elekmedia Komputindo.
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26
- Panggabean. 2002. *Kasus Aset Yayasan Dan Alterlatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005. *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Riant, Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rivai, Veitzal., 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Ryias Rasyid.M, 2000. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarwono, S. W. 2002. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

- Siagian Sondang, 2007, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung.
- Silalahi, 2000. *Penelitian Pembuatan Briket Kayu dari Serbuk Gergajian Kayu*. Hasil Penelitian Industri DEPERINDAG. Bogor.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Soedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*, Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press
- Suharno HP. 2005. *Ilmu Kepeleatihan Olahraga*. Yogyakarta IKIP Yogyakarta
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta:Prenada Media
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Tamin, F. 2004. *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta : Belantika.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Usman, Husaini. Setiadi, Purnomo. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahhab, Abdul Solichin, 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Hlm.3.
- Wibawa, Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*, PT.Rajagrafindo Persada Jakarta.

Widjaja, Haw, 2003, *Pemerintahan Daerah dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Buku Seru: Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 tahun 2016 tentang rincian Tugas dan Tata Kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

C. DOKUMEN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru.

Lampiran : DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

PERANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN ATLET SEJAK USIA DINI